

SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI KABUPATEN TAKALAR



Oleh:

MUH. FAUZI RISA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611121320

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN TAKALAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. FAUZI RISA

Nomor Stambuk: 105611121320

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Muh. Fauzi Risa
Nomor Induk Mahasiswa : 105611121320
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM



Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0381/FSP/A.4-II/II/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025.

Mengetahui:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

Tim Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si

2. Dr. Syukri, S.Sos., M.Si

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

4. Hardianto Hawing, ST., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fauzi Risa


Nomor Induk Mahasiswa : 105611121320

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Januari 2025

Yang Menyatakan



Muh. Fauzi Risa

ABSTRAK

Muh. Fauzi Risa, Nurbiah Tahir, Nur Khaerah. 2024. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Takalar:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia studi Pemerintah Daerah di Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia Pada dasarnya berfokus pada 3 elemen dasar sebagai acuan dalam penilaian suatu daerah dan wilayah yang ada, 1) Kesehatan, 2) Pendidikan, dan 3) Daya Beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan studi kasus deskriptif teknik pengambilan data yang digunakan merupakan kumpulan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pihak – pihak yang terkait.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model teori David & R 2009 sebagai alat analisis dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap manajemen strategi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 1) Perumusan Strategi, 2) Penerapan Strategi, dan 3) Penilaian Strategi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar berada pada tahap 1) Akan (Perencanaan), 2) Sedang (Implementasi) dan 3) Telah berlangsung (Evaluasi). Diketahui bahwa melalui Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat dengan menjalankan beberapa strategi memberantas anak putus sekolah sebagai komponen pertama IPM memberikan akses kejar paket dan sarana sekolah bagi usia sekolah yang putus sekolah serta memberikan fasilitas PKBM, kemudian memberikan akses kesehatan melalui infrastruktur kesehatan yang disediakan dengan memberikan beberapa program penguatan kualitas hidup agar menekan angka kematian, dan yang terakhir daya beli dengan memberikan pelatihan potensi dan pemberian permodalan menggunakan skema KUR yang dirancang untuk memudahkan pengembangan UKM dan IKM serta bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kata Kunci : *Strategi, Perumusan Strategi; penerapan strategi; penilaian*

strategi, Indeks Pembangunan Manusia, pendidikan; kesehatan; daya beli

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Takalar.”**

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Muh. Risa Tahir, S.Ag. dan Ibu Johorah, S.Pd. yang senantiasa memberi semangat, motivasi, kasih sayang, doa tulus tanpa henti dan dukungan baik berupa moral dan moril. Kedua orang tua hebat yang senantiasa berada disisi penulis, sosok Ayah yang mengajarkan sebuah arti perjuangan dan kerja keras sedangkan sosok Ibu sebagai malaikat tanpa sayap yang selalu memberikan nasihat kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala serta menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Tidak lupa juga ke-enam saudaraku yang tercinta Muh. Fachru Risa, Abd. Maarif Risa, Siti Aulia Risa, Gilang Ramadan Risa dan Azzam Nurwahid Risa terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos,M.Ap selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terima kasih kepada Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku dosen Pendamping Akademik (PA) saya yang telah memberikan dukungan serta pemahaman dalam menjalankan studi saya setiap semesternya.

7. Kepada Kepala Kantor seluruh Pegawai, staff-staff dan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang sangat membantu dalam memberi data sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Terima Kasih kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Bibit Unggul Persyarikatan (BUP) sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya kepada Kanda Ikhwan Aulia selaku pengurus akademik Beasiswa Bibit Unggul Persyarikatan (BUP) angkatan pertama.
9. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Bilingual Class Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 dan kawan-kawan militan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah diterima layaknya keluarga.
11. Terima kasih kepada partner sekaligus keluarga penulis yaitu Ayani Dinasti Azira Tahir, Nur Aziza, Krisda Ekawati, Zahcrawan, Riska Dewanti Rahman, Muh Rafi, Umar Taslim, dan Risqi Abdullah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis baik itu moril maupun material dari awal hingga akhir perkuliahan.

12. Terima kasih kepada teman – teman sekaligus sahabat saya Sandi, Arsyian Adreawan, Muh Irham, Nurul Ramadhany, Annisa Aulia Utami Putri F, Rezky Amalia Febrina, Kartini Rahman, Muh Fachri Ramadhan, Andi Azka Qalbi Ikhsan, Muh. Dafa Shafwan Alfaridzy, Ilham, Putra Astaman dan Muh. Agung yang telah memberikan dukungan dan semangat baik moril dan materil kepada penulis dari awal pembuatan skripsi hingga akhir.

13. Dan yang terakhir terima kasih kepada laki – laki tangguh namun terkadang keras kepala, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri Muh. Fauzi Risa yang berumur 22 tahun saat membuat karya tulis ini namun terkadang sifatnya masih seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan tidak tercapai sesuai harapannya. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak kenal lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia dan semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal – hal baik dalam semesta.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini.

Mudah – mudahan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Januari 2025

Muh. Fauzi Risa



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PERNYATAAN.....	3
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Teori dan Konsep.....	17
C. Kerangka Pikir.....	36
D. Penelitian.....	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Keabsahan Data.....	46
BAB IV DAN PEMBAHASAN.....	47

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	99
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMP I RAN.....	129



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Berdasarkan analisis Publish Or Perish	14
Tabel 2. 2 Konsep – Konsep Pembangunan.....	22
Tabel 2. 3 Batas Maximum Dan Minimum	33
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Takalar.....	47
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Perkecamatan Tahun 2020 - 2023	50
Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 menggunakan UHH hasil SP2010 dan UHH hasil Long From SP2020.	51
Tabel 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten Tahun 2020 – 2024 menggunakan UHH hasil SP2010 dan UHH hasil Long From SP2020.	53
Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Takalar	55
Tabel 4. 6 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Takalar 2020 – 2024.....	56
Tabel 4. 7 Jumlah Lembaga Usaha di Kabupaten Takalar.....	57
Tabel 4. 8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024	59
Tabel 4. 9 Tabel Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.....	70
Tabel 4. 10 Tabel Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Pendidikan	72
Tabel 4. 11 Tabel Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Kesehatan.....	78
Tabel 4. 12 Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Daya Beli	83

Tabel 4. 13 Tabel Capaian dan Evaluasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Takalar98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Analisis Data Berdasarkan Vosviewer (Network Visualization)	12
Gambar 2. 2 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia	35
Gambar 2. 3 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4. 1 Satu desa satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun di Takalar diluncurkan oleh Bupati Takalar, Selasa 29 Juni 2021).....	77
Gambar 4. 2 Pj Ketua TP PKK Takalar Luncurkan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	82
Gambar 4. 3 Dekranasda Kabupaten Takalar Berpartisipasi dalam Pameran Kriyanusa 2024 di Jakarta (28/08/2024).....	88
Gambar 4. 4 Mercure Makassar Nexa Pettarani Salurkan CSR Pendidikan di SMK Yapta Kabupaten Takalar (Senin/21/08/2023) dan Dukung Potensi Daerah, Nindya Karya Salurkan Bantuan Bibit Rumput Laut di Takalar (Jumat/27/12/2024)	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan proses yang diperlukan bagi individu untuk memiliki kehidupan yang memuaskan. Aspek terpenting dalam pembangunan manusia adalah memastikan gaya kehidupan yang sehat dan bahagia, pengetahuan tentang sumber daya sehari-hari yang diperlukan untuk gaya hidup yang menyeluruh (Isa Pratowo, 2012).

Menurut Bonaraja Purba, dkk (2021), konsep pembangunan manusia adalah sebagai berikut: “Pembangunan manusia adalah suatu konsep yang mengakui kemanusiaan sebagai tujuan akhir konstruksi, bukan sebagai proses konstruksi”. Artinya pembangunan manusia perlu menjadi peran bukan sebagai sarana dalam membangun suatu daerah atau negara.

Menurut UNDP (2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama membangun kapasitas. Konsep ini menunjukkan bahwa, selain variabel ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat menjadi faktor kunci dalam mengevaluasi proses pembangunan.

Ada beberapa hal mengapa Pembangunan manusia perlu menjadi prioritas yakni pertama (1) dan terpenting, adanya sistem pendidikan yang baik dan efisien. Untuk itu perlu adanya perombakan sistem komprehensif, khususnya dalam hal kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tempat kerja. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran penting dalam

menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis IPTEK yang efektif dan efisien yang tersebar di seluruh tanah air.

Kedua (2), pengembangan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka perbaikan diri dan pengembangan karakter. Ketiga (3) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai cara seperti pelatihan, kompetensi, dan kolaborasi. Tenaga kerja profesional dan terampil seperti tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global (Budi Aryo, 2020).

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) (BAPPEDA Kabupaten Tanjung, 2017), Pembangunan manusia harus diutamakan sebagai pilihan individu dan sarana untuk mencapai tujuan. Pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan manusia melalui peningkatan kesehatan, pengetahuan, dan pekerjaan. Konsep pembangunan manusia UNDP memiliki empat komponen: produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 110 dalam Laporan Pembangunan Manusia dengan IPM sebesar 0,718, sedangkan pada tahun 2021 menduduki peringkat 116 dari 191 negara. Selama dua tahun terakhir, IPM mengalami penurunan hampir 90% di seluruh negeri karena penurunan indeks kesehatan dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tantangan perekonomian akibat pandemi Covid-19 (Nurlina et al., 2023).

Sedangkan pada tahun 2022 sampai 2023, dengan IPM yang terus meningkat, dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 74,39 pada tahun 2023, maka dapat

disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perluasan ini berfokus pada peningkatan seluruh aspek PHT, termasuk kesehatan dan kesejahteraan, pengetahuan, dan standar hidup (Ummah, 2024).

IPM merupakan indikator kunci untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Hal ini juga dapat menentukan tingkat pertumbuhan atau tingkat perkembangan suatu wilayah. Di Indonesia, peraturan terpenting untuk meningkatkan IPM adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan publik adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Peningkatan IPM tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, namun juga bagi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh UU No. 23 Tahun 2024, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM mereka sendiri.

Menurut Efendi, dimensi tubuh manusia meliputi ukuran, komposisi, karakteristik (kualitas), dan preferensi individu. Dimensinya sebanding dengan yang lain. Selain kuantitas dan kualitas, komposisi dan penyajian juga penting. Jika angkanya tinggi, berarti banyak orang yang tidak produktif dan pertumbuhan sumber daya manusia akan terganggu. Selain itu, penting untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di bidang tertentu. Jika angkanya tinggi berarti banyak orang yang tidak produktif dan pertumbuhan sumber daya manusia akan

terganggu. Selain itu, penting untuk memiliki Sumber daya manusia yang berkualitas di bidang tertentu. Ada berbagai cara sehingga meningkatkan produktivitas manusia. Salah satu faktor kuncinya adalah pembangunan manusia (*Human Capital*) (BAPPEDA Kabupaten Tanjung, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) menyajikan rata-rata capaian kinerja suatu negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu: a) usia yang panjang rata-rata kehidupan berdasarkan lama hidupnya, yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, b) Pendidikan, yang selaras dengan asas-asas Harapan dan tata tertib sekolah, c) Standar hidup layak, yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (Cahyadi M, 2020).

Dalam pembangunan manusia, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam seluruh kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelanggan di beberapa bidang, termasuk Jasmani (kesehatan), Intelektual (pendidikan), Aspek Kesejahteraan Ekonomi (Beli), dan Akhlak (Iman dan Takwa) (BAPPEDA Kabupaten Tanjung, 2017).

Satu di antara upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan daerah. Proses ini membutuhkan perencanaan, perencanaan yang baik harus sama tujuannya yaitu memiliki visi yang sama dan mampu memperkuat tekad semua pihak yang terkena dampak, termasuk masyarakat umum., dunia usaha, dan pelaku pembangunan Adapun badan yang bertanggung jawab atas pelayanan perencanaan pembangunan daerah adalah Bappelitbangda atau Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah. Keberhasilan

pembangunan suatu daerah sungguh tidak terlepas dari kerja keras Bappelitbangda dengan Organisasi Perangkat Daerah tentunya.

Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Bappelitbangda membantu Kepala Negara dalam memahami kebijakan di bidang pembangunan daerah serta mengawasi pelaksanaan proyek daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu dikoordinasikan, diintegrasikan, dan diselaraskan oleh Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah.

Agar pembangunan dapat terlaksanakan, Bappelitbangda juga harus membantu mempermudah realisasi. Bappelitbangda harus membantu dalam proses dan memastikan tujuan pembangunan berhasil dicapai. Penting bagi Bappelitbangda untuk bekerja sama dan bermitra dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Jika pemangku kepentingan melakukan realisasi bersama-sama, itu dapat membantu melakukannya bersama. Maka, tujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Akibatnya, bekerja dengan perencanaan yang baik, yang menyatu dalam kerangka visioner, dan dengan masing-masing pihak yang menyelenggarakan kepentingannya juga bagus (Hasanah & Imron, 2022).

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara/wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang tren saat ini yang akan mengarah pada peningkatan produktivitas (Mohamad Yamin Latuconsina, 2017).

Pengembangan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab organisasi untuk mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang selaras dengan perubahan dinamika lingkungan. Pengetahuan manusia mempunyai peran aktif dan dominan dalam semua organisasi, karena berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi dituntut untuk menggunakan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing. Dengan keadaan seperti ini, penting bagi suatu lembaga pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat dan kontribusi signifikan terhadap produktivitas pegawai (Amrullah et al., 2023).

Menurut teori Yuridis (Ajizah et al., 2021a), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, hingga pemanfaatannya. serta pengalokasian sumber daya yang dalam rangka

peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian peranan dan fungsi Bappelitbangda Takalar dalam pengimplementasian berdasarkan kebijakan dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia yakni: 1) Usaha dibidang kesehatan melalui, pemerataan gizi yang seimbang, pemerataan pelayanan kesehatan peningkatan peran masyarakat dalam intervensi kepemimpinan dalam upaya hidup sehat. 2) Di bidang pendidikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi siswa melalui penerapan paket yang meliputi peningkatan kelompok belajar dan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat mencapai posisi optimal (AMH = 100 persen) dalam jangka waktu mendatang. 3) Sektor ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan efisiensi kerja dan produktivitas yang lebih tinggi Serta meningkatkan investasi di kawasan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendorong kepatuhan hukum.

Indeks Pendidikan didasarkan pada dua indikator: Harapan Lama Sekolah (HSL) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS). Selama lima tahun terakhir, jumlah siswa di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata usia sekolah di Kabupaten Takalar pada tahun 2020 adalah 7,29 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 7,73 dalam hal ini nilai yang diperoleh cenderung stagnan. Dengan kata lain, siswa di Kabupaten Takalar kini bisa bersekolah hingga jenjang SD. Pada Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Takalar berada pada angka

12,41 di tahun 2020 dan pada tahun 2024 sebesar 12,50 artinya nilai ini juga cenderung stagnan (BPS Publikasi Takalar, 2024).

Indeks kesehatan ditinjau oleh Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mengacu pada jumlah tahun yang dapat diukur sepanjang hidup seseorang. Ada dua sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) yang digunakan pertama berdasarkan UHH Hasil Sensus Penduduk 2010 (UHH SP2010) dan kemudian dimutakhirkan BPS pada tahun 2023 menggunakan UHH Hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020). Sebagai perbandingan, UHH SP2010 dan UHH LF SP2020 Kabupaten Takalar mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada UHH SP 2010 tahun 2020, rata-rata usia penduduk Takalar adalah 67,18. Usia tersebut akan mencapai 68,11 pada tahun 2024. Artinya masyarakat di Kabupaten Takalar dapat hidup hingga usia sekitar 67-68 tahun. Sedangkan pada sumber data UHH LF SP2020 berbanding lebih tinggi pada tahun 2020 sebesar 72,69 dan di tahun 2024 sebesar 73,69 artinya masyarakat Kabupaten Takalar rentang hidup usianya sekitar 72 – 73 tahun (BPS Publikasi Takalar, 2024).

Indeks Pengeluaran merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dalam pengeluaran kapita dan paritas daya beli. Pada tahun 2020, biaya hidup di Kabupaten Takalar diperkirakan sebesar Rp10.454.000 per tahun, dengan indeks konsumsi sebesar 71,49%. Pada tahun 2024, rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat menjadi sekitar Rp11.679.000 per tahun, dengan indeks konsumsi sebesar 74,88% (BPS Publikasi Takalar, 2023).

Produktivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kemakmuran merupakan kontributor penting bagi kemajuan manusia. Pengertian pembangunan manusia terbagi menjadi dua bagian: peningkatan kapasitas fisik masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Ciri-ciri lainnya termasuk kapasitas untuk menggunakan kemampuan dalam lingkungan produktif, budaya, sosial, dan politik.

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Takalar karena kondisi IPMnya Kabupaten Takalar berdasarkan UHH Hasil Sensus Penduduk 2010 (UHH SP2010) sebesar 67,31 pada tahun 2020, sedangkan di tahun 2024 sebesar 69,47 Berdasarkan Standar BPS dan UNDP Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar berada di tingkat menengah keatas. Berdasarkan urutan peringkat ke-22 IPM dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, IPM Kabupaten Takalar tetap menunjukkan adanya pertumbuhan, meskipun ukurannya relatif kecil namun hal ini menambah komponen penyusun IPM. (Publikasi BPS Takalar Dalam Angka 2024).

Sedangkan berdasarkan UHH Hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020) Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang dulunya berada pada peringkat ke-22 naik ke peringkat 18 dari 24 kabupaten dengan nilai 71,46 di tahun 2023 yang kemudian tetap meningkat angkanya ditahun 2024 dengan angka 72,06. Ini artinya kabupaten Takalar dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang selalu mengalami peningkatan.

Maka perlu diketahui sejauh mana strategi serta keterlibatan pemerintah Kabupaten takalar dalam proses peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dilihat

dari keseluruhan Masyarakat miskin Kabupaten Takalar pada tahun 2023 adalah 25.010 jiwa (BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2024), serta kualitas hidup berdasarkan indeks Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli.

Dilihat dari analisis latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Takalar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Penerapan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar ?
3. Bagaimana Penilaian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, perumusan strategi pemerintah daerah Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk mengetahui, penerapan strategi pemerintah daerah Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk mengetahui, penilaian strategi pemerintah daerah Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Secara harfiah penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam memberikan pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Administrasi pemerintahan khususnya Ilmu Administrasi Negara

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi informasi awal bagi peneliti yang ingin meneliti dibidang Pemerintah khususnya adalah strategi pemerintah daerah yang terencana dan juga menjadi informasi bagi masyarakat sejauh apa peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Takalar.

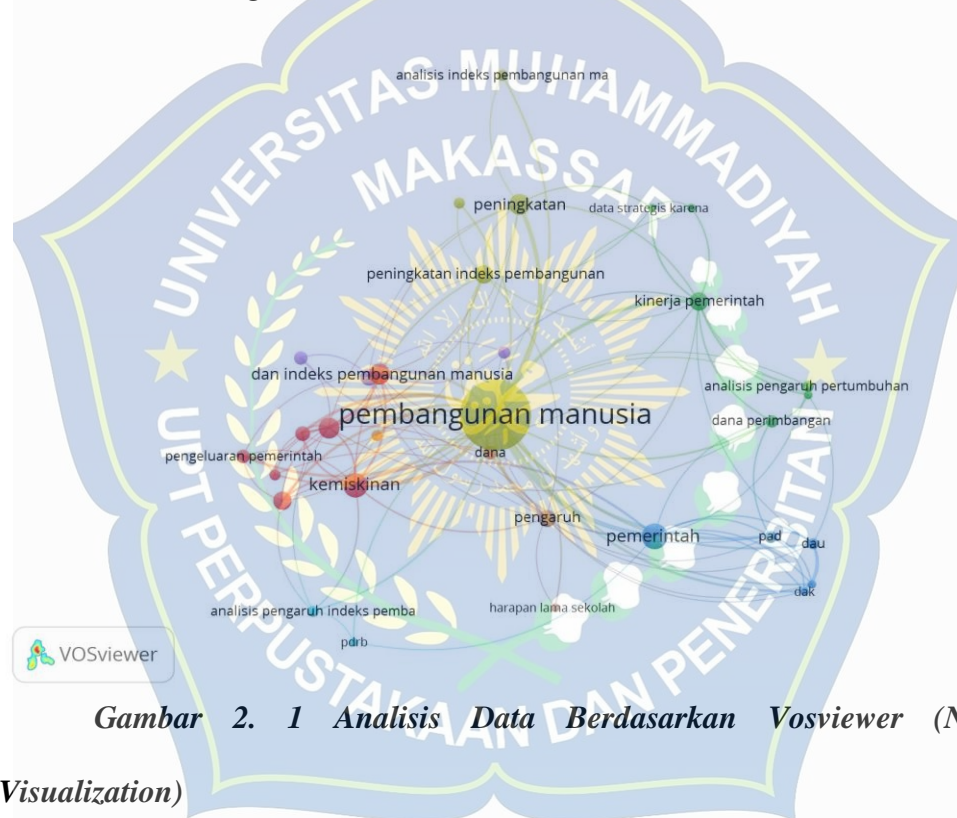


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti, dan dapat juga digunakan sebagai titik awal untuk penelitian selanjutnya. Sebagaimana dinyatakan di bawah ini, keadaan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Analisis Data Berdasarkan Vosviewer (Network Visualization)

Analisis Vosviewer diatas merupakan analisis berdasarkan data Publish Or Perish pada Scholar dalam bentuk RIS. Terdapat 32 item, 8 clusters, Link sebanyak 122, dan Total Link Strength sebanyak 303. Pada cluster pertama berwarna hijau kekuningan “Pembangunan Manusia” pada gambar 2.1 dinyatakan bahwa cluster tersebut bahwa penelitian sebelumnya tersebut saling berkaitan dengan, Kinerja

pemerintah, pengaruh penegeluaran pemerintah, daerah strategis, kemiskinan, harapan lama sekolah, dan dana perimbangan sebagai subjek indeks Pembangunan manusia. Dapat dilihat bahwa masing – masing cluster saling berhubungan.

Pada cluster merah “Kemiskinan” subjek Pembangunan manusia berkaitan terhadap pengaruh, pemerintah, pengeluaran pemerintah, peningkatan indeks Pembangunan dan ekonomi. Cluster biru “Pemerintah” subjek Pembangunan manusia berkaitan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), PDRB (Produk Domestik Indonesia), dana perimbangan dan analisis pengaruh pertumbuhan. Cluster ungu “Kualitas” dengan subjek indeks Pembangunan manusia saling berkaitan terhadap Pengaruh, Pengeluaran pemerintah dan peningkatan. Untuk cluster merah ke-abu “Pengaruh” indeks Pembangunan manusia sebagai subjek penelitian saling berkaitan terhadap harapan lama sekolah, PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), kemiskinan, kualitas, strategis, dan kinerja pemerintah. Kemudian pada cluster Kuning “Peningkatan” saling berkaitan dengan ekonomi, kinerja pemerintah, dan data strategis.

Terkait dengan strategi Peningkatan Pembangunan manusia, ada beberapa faktor pendukung kenapa peneliti mengangkat judul penelitian ini. Berikut ini penulis rangkum beberapa data relevan dalam tabel:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Berdasarkan analisis Publish Or**Perish**

Authors/Year	Title	Hasil Penelitian
Ulfiona Rizki Ashari, (2018)	Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia Di Kabupaten Sampang	Hasil analisis SWOT yang telah diselesaikan oleh para peneliti beberapa bulan lalu adalah 11 alternatif strategi yang direkomendasikan untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sampang dalam upaya mereka untuk meningkatkan pembangunan manusia di provinsi tersebut. Strategi yang dimaksud dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya dan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang ada dan meminimalkan dampaknya.
Muhammad Taufan Ashshiddiqi et al., (2021)	Strategi Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.	Saat ini, jumlah penduduk pulau ini hampir sesuai dengan ambang batas IPM, yang didasarkan pada tiga indikator utama IPM: kesehatan, pendidikan, dan khususnya perekonomian Desa Pakuon. Menurut lembaga independen bidang kesehatan, kondisi kesehatan masyarakat Desa Pakuon saat ini sangat buruk karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri maupun kesehatan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tingkat pendidikan juga cukup rendah, dengan konsensus umum bahwa, terlepas dari seberapa baik kinerja sekolah dalam jangka panjang, siswa pada akhirnya akan lulus dan menjadi guru, menjadikan mayoritas penduduk Desa Pakuon sebagai warga kelas dua.

Authors/Year	Title	Hasil Penelitian
(Jember & Cahyo Diartho, 2018)	Strategi Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Situbondo	Berdasarkan hasil analisis AHP digunakan sebagai strategi bagi sektor kesehatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil survei dan penentuan prioritas beberapa pilihan. Berdasarkan hasil analisis AHP, perancangan strategi yang digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo mengutamakan pelayanan kesehatan sebagai strategi prioritas peningkatan IPM di sektor kesehatan.
(Fahrurrozi et al., 2023)	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)	Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan ekonomi dan kemanusiaan di Kabupaten Lombok Timur I mengalami kehilangan kendali. Terdapat indikasi bahwa Perlu dicatat bahwa indeks pembangunan manusia I mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan indeks Prestasi (modal manusia) Kabupaten Lombok Tim. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Timur Diukur. Indeks Harapan, salah satu indikator baru Hidup (AHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan peneluaran. Berdasarkan hasil analisis data mengenai topik penelitian, dan dari indikator kunci Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pembelajaran terdapat Indikator-indikator yang rendah kontribusinya Terhadap Kemajuan IPM Kabupaten Lombok Timur.

- a. Pada judul “Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia Di Kabupaten Sampang” yang ditulis oleh (Ashari, 2018). Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada strategi meningkatkan indeks

Pembangunan manusia tetapi menggunakan analisis SWOT dalam program tinjauan data.

- b. Pada judul “Strategi Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pakuaon Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Cianjur.” yang ditulis oleh (Taufan Ashshiddiqi et al., 2021). Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pada indeks pembangunan manusia (IPM) pada sektor kesehatan, kurangnya kepekaan terhadap kondisi kesehatan maka dari itu penelitian ini juga akan mencakup hal tersebut.
- c. Pada judul “Strategi Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Situbondo”. yang ditulis oleh (Jember & Cahyo Diartho, 2018). Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus Strategi dalam meningkatkan indeks pemmbangunan manusia dalam bidang Kesehatan atau indeks kesehatan karena itu, peran pemerintah dalam promosi kesehatan sangatlah penting.
- d. Pada judul “Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat).” yang ditulis oleh (Fahrurrozi et al., 2023) .Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus meningkatkan indeks Pembangunan manusia tetapi ini berfokus pada ketahanan ekonomi terhadap wilayah dan ini merupakan hal yang sama yang akan diteliti pada penelitian ini.

B. Teori dan Konsep

1. Manajemen Strategi

a. Pengertian dan Dimensi Manajemen Strategi.

Salah satu definisi manajemen strategis adalah manajemen senior dan keahlian dalam merumuskan, menerapkan, dan menilai kebijakan operasional dan fungsional yang membantu organisasi mencapai tujuannya (David, 2009:5). Sebaliknya, menurut Pearce II dan Robinson (Rivai dan Prawironegoro, 2015:1), manajemen strategis adalah seperangkat pedoman dan asumsi tunggal yang menghasilkan rumus dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan tertentu. Penggunaan teori manajemen strategis pada tubuh Freed R. David berfungsi sebagai proksi untuk teori persuasi strategis.

Bedanya, manajemen strategis digunakan untuk mendukung perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, sedangkan perencanaan strategis hanya mendukung perumusan strategi. Ancaman lingkungan dan pengamatan terhadap strategi manajemen, yang merupakan bagian dari kekuatan dan kelemahan perusahaan (Hunger & Wheelen, 2003:4).

Strategi, menurut Wheelen-Hunger (2003–155) dalam (Idris, 2021), adalah seperangkat prinsip dan prosedur manajerial yang menentukan bagaimana suatu organisasi beroperasi dalam lingkungan yang sulit. Berdasarkan hal ini, perencanaan strategis memiliki beberapa elemen mendasar, yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan Lingkungan

Komposisi lingkungan ini terdiri atas dua bagian, yaitu lingkungan luar (Eksternal) dan lingkungan dalam (Internal).

2) Perumusan Strategi

Pengembangan jangka panjang untuk manajemen efektif dari peluang dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga, adalah strategi pengembangan. Tinjauan strategi mencakup pendefinisian misi organisasi atau perusahaan, mengidentifikasi tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan.

3) Menerapkan strategi.

Menerapkan proses strategis meningkatkan strategi dan manajemen dengan mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur. Program adalah kumpulan kegiatan atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas berulang kali. Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Lebih lanjut, prosedur adalah suatu sistem terstruktur yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

4) Evaluasi dan Pengendalian.

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas organisasi dan hasil kinerja yang dipantau dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan.

Sedangkan Strategi menurut (David & R, 2009), proses manajemen strategis terdiri dari tiga langkah:

1) Perumusan Strategi

Perumusan strategis melibatkan pendefinisian visi dan misi organisasi, mengidentifikasi sumber daya dan peluang eksternal, memastikan stabilitas dan pertumbuhan internal, mengembangkan tujuan jangka panjang, mengevaluasi strategi alternatif, dan menerapkan strategi terbaik untuk mencapainya. Isu strategis meliputi penentuan bisnis apa yang akan dijalankan, cara mengelola sumber daya, cara memperluas atau mendiversifikasi operasi, cara memasuki pasar internasional, dan cara membangun tim yang terdiri dari 30 orang.

2) Penerapan Strategi

Penerapan strategis melibatkan pengembangan struktur organisasi yang kuat, penerapan proses yang efektif, pengelolaan keuangan, pemanfaatan sistem informasi, dan penyesuaian kompensasi karyawan dengan tujuan organisasi. Implementasi strategi terkadang disebut sebagai "tahap aksi" oleh manajemen strategis. Pengembangan dan penerapan strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengembangan pribadi. Namun, jika strategi tidak diterapkan, strategi tersebut tidak efektif.

3) Penilaian Strategi

Penilaian strategis merupakan langkah terakhir dalam manajemen strategis. Manajer harus memahami kapan suatu strategi tidak berjalan dengan baik, dan evaluasi strategi merupakan metode utama untuk

mengumpulkan informasi. Semua strategi perlu dimodifikasi karena faktor eksternal dan internal berubah seiring waktu.

Tiga aspek terpenting dari pengembangan strategi adalah 1) mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang memengaruhi strategi, 2) meningkatkan kinerja, dan 3) mengembangkan strategi yang kohesif.

b. Analisis dan Pemilihan Strategi

Analisis dan pemilihan strategi dilakukan untuk mengidentifikasi alternatif terbaik bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya (David, 2017). Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa alternatif yang dipilih mampu mencapai atau mendefinisikan tujuan dan misi perusahaan atau lembaga.

Menurut David (David et al., 2017), tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak dan dapat menguntungkan bisnis karena terbatasnya jumlah tindakan dan metode yang mungkin untuk menerapkannya. Dalam mengembangkan strategi, perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih sesuai dengan situasi dan dapat secara efektif mengatasi masalah yang muncul.

2. Defenisi Pembangunan

Pembangunan merupakan topik yang sering dibahas. Pembangunan pada hakikatnya merupakan layanan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, bagi sebagian besar penduduk, pembangunan terutama dilihat sebagai keuntungan finansial. Pembangunan fisik di Indonesia telah menghasilkan banyak perubahan, baik di dalam negeri maupun di daerah. Berbagai fasilitas umum, seperti klinik, sekolah, dan PDAM, telah dibangun di sepanjang jalan yang lebar dan ramai.

Ada beberapa manfaat dari pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang informasi (Taufan Ashshiddiqi et al., 2021).

Pembangunan berdasarkan analisis menurut para ahli. Menurut Suryono (Suryono, 2010), definisi konsep konstruksi didasarkan pada dua aspek penting, yaitu etimologi dan ensiklopedia. Secara lebih rinci, penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Secara etimologis, kata “bangunan” berasal dari kata “bangun” yang berarti proses membangun. Keempat jenis arti bangunan tersebut terdiri dari: (1) bangunan dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi), (2) bangunan dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangunan dalam arti bentuk (aspek anatomi), dan (4) membangun dalam arti kata kerja membuat, membangun, atau membina (menggabungkan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk).
- b. Menurut ensiklopedia, istilah "pembangunan" telah menjadi bahasa dan konsep di dunia. Konsep ini mirip dengan konsep lain seperti pertumbuhan (*Growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan social (*social change*), pembebasan (*liberation*), inovasi (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national developement*), pengembangan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*).

Untuk membantu pembaca memahami definisinya, prinsip-prinsip pengembangan Suryono dibagi ke dalam kategori berikut.

Tabel 2. 2 Konsep – Konsep Pembangunan

Konsep	Pendekatan	Orientasi
Pertumbuhan (Growth)	Ekonomi	Negara – negara Dunia (umum)
rekonstruksi (<i>reconstruction</i>)	Pemulihan ekonomi	Eropa (negara yang terlibat PD II)
modernisasi (<i>modernization</i>)	iptek	Negara dunia ketiga
Westernisasi (<i>Westernization</i>)	Kebudayaan Dan Iptek	Negara Dunia Ketiga (Sebelah Timur)
Perubahan Social (<i>Social Change</i>)	Sosial	Negara Dunia Ketiga
Pembebasan (<i>Liberation</i>)	Ekonomi - Politik	Amerika Latin
Inovasi (<i>Innovation</i>)	Iptek Kemudian Social – Politik	Negara Dunia Ketiga
Pembangunan Nasional (<i>Nation Building</i>)	Politik	Negara Dunia Ketiga
Pembangunan Nasional (<i>National Developement</i>)	Politik	Negara Dunia Ketiga
Pengembangan	Politik	Indonesia
Pembimbingan	Politik	Indonesia
Pembangunan	Campuran (Eklektik)	Negara Dunia Ketiga

Sumber: Suryono, 2011:53-54.

Sedangkan menurut Harjanto (Suryono, 2010) mendefinisikan teori pembangunan sebagai teori yang didasarkan pada masalah dan perubahan dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut definisi ini, fokus utama pembangunan harus pada peningkatan keamanan manusia. Peningkatan kesejahteraan manusia merupakan tujuan akhir pembangunan.

Menurut Siagian (Simanjuntak & Silitonga, 2020), pembangunan adalah memberikan wawasan mengenai pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian

kegiatan usaha yang diarahkan dan dilaksanakan secara transparan oleh suatu pemerintah, suatu bangsa, atau suatu bangsa, dengan membawa modernitas dalam berbagai operasional bangsa."

Penyelenggaraan rencana pembangunan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan reformasi peradilan dan administrasi.

Menurut Hannum & Safrianto (Panggabean et al., 2023), pemerintah daerah memberikan dukungan kepada warga dan dunia usaha berdasarkan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan dan keinginan masing-masing daerah untuk membentuk Badan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian daerah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah daerah.

Jadi menurut Ismawaty (Panggabean et al., 2023), Pembangunan adalah suatu proses sistematis dan aman yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat Pemerintah dan warga bekerja sama untuk mengembangkan kawasan berdasarkan kebutuhan dan prioritas tertentu. Proses pembangunan suatu wilayah melibatkan penilaian kondisi dan potensinya, dengan mempertimbangkan tren regional, provinsi, dan nasional.

Keberhasilan suatu perencanaan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya. Rencana harus mampu mendukung pertumbuhan di beberapa sektor. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai potensi dan sumber daya suatu daerah (Ajizah et al., 2021)

3. Paradigma Pembangunan

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pertama kali memperkenalkan paradigma pembangunan manusia, yang kini telah menjadi komitmen dunia untuk mendorong pertumbuhan di banyak negara. Di Indonesia, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan manusia. Menurut Suryono (Suryono, 2010), Paradigma ini adalah serangkaian asumsi, teori, metodologi, model, dan solusi yang terkait dengan situasi tertentu.

Di negara berkembang, seperti Indonesia, kualitas sumber daya manusia merupakan isu penting yang telah menyebabkan munculnya isu-isu lain. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat pembangunan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Pengetahuan manusia yang berkualitas tinggi akan memberikan hasil yang serupa (Ashari, 2018).

Pertumbuhan negara-negara dalam kaitannya dengan negara-negara besar lainnya, serta kebutuhan negara-negara untuk beradaptasi dengan berbagai paradigma pembangunan yang menguntungkan negara mereka sendiri, merupakan tantangan yang terus berlanjut. Menurut Tjokrowinoto (Suryono, 2010), paradigma pembangunan akan bergeser dari paradigma pertumbuhan ke paradigma

keberlanjutan, paradigma neo-ekonomi, paradigma ketergantungan, dan paradigma pembangunan manusia.

Menurut Mahbub Ul Haq (Ashari, 2018), komponen utama paradigma pembangunan manusia adalah keadilan, keberlanjutan, produktivitas, dan pemberdayaan. Komponen-komponen utama tersebut tercantum di bawah ini:

- a. Pertama, kerja sama dalam memperoleh akses terhadap informasi ekonomi dan politik sangat penting bagi warga negara. Artikel ini membahas beberapa topik, termasuk: (1) distribusi aset produktif yang adil; (2) peningkatan kinerja keuangan; (3) sistem kredit bank untuk mendukung usaha kecil dan menengah; dan (4) sistem politik yang demokratis untuk menjaga kepercayaan.
- b. Kedua, produktivitas didorong oleh praktik bisnis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Kebijakan ini mendorong investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan masyarakat. Untuk memaksimalkan kapasitas produksi, investasi harus difokuskan pada peningkatan SDM, yang dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. SDM berkualitas tinggi memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat.
- c. Sasaran ketiga adalah memberdayakan individu dengan mengubah potensi dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta mengatasi masalah sosial. Dalam konteks ini, pembangunan melibatkan pemberdayaan individu untuk mengejar tujuan

mereka, tidak hanya dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga dengan memperluas pilihan publik, sehingga individu dapat mewujudkan potensi penuh mereka.

- d. Fokusnya adalah pada pengembangan strategi pembangunan fisik, manusia, keuangan, dan lingkungan untuk mencapai tujuan utama mewujudkan keamanan rakyat. Perencanaan, implementasi, dan evaluasi metode pembangunan yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses pembangunan.

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah aspek penting dalam setiap bisnis, karena tanpa perencanaan, tujuan dan sasaran tidak mungkin tercapai. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah ke arah itu. Perencanaan dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti pilihan ras dan sebagai alat untuk menentukan kejadian di masa depan. Dengan kata lain, begitu sebuah rencana dibuat, maka rencana itu harus diikuti. Perencanaan dalam arti seluasnya adalah untuk mempersiapkan sistematis kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Tjokroamidjojo & Bintoro, 1989). Oleh karena itu sejalan dengan Tarigan mendefinisikan perencanaan sebagai proses pencapaian tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu teknik untuk mencapai tujuan secara tepat waktu, aman, dan efisien berdasarkan perubahan kondisi suatu negara atau wilayah (Sjafrizal, 2016).

Aspek terpenting dari suatu prembangunan yang direncanakan adalah fleksibilitasnya, yang berarti perencanaan pembangunan tersebut harus dapat ditingkatkan atau ditinggalkan jika tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Terlepas dari sektor apa pun, pemerintah hanya dapat memberikan pedoman umum untuk pembangunan di setiap bidang. karena kondisi geografis, sosial, dan agama yang unik.

Maka tujuan utama pembangunan adalah mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diarahkan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, peraturan terkait pembangunan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi sistem yang terdesentralisasi bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara melalui peningkatan pelayanan publik dan memaksimalkan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan (Kholik, 2020).

Proses pembangunan kota melibatkan beberapa disiplin ilmu, antara lain geografi, ekonomi, ilmu sosial, agama, politik, pemerintahan, dan keuangan. Untuk membangun suatu negara, diperlukan orang yang memiliki keahlian di beberapa bidang seperti perencanaan, teknologi, ekonomi, politik, hukum pemerintahan, dan

ilmu sosial (Sjafrizal, 2016). Dalam hal ini, tenaga ahli telah memperoleh pengalaman berharga dalam manajemen proyek, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap teori-teori yang umum dipahami dan diterapkan oleh politisi dan pejabat pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional proyek pembangunan, pemahaman terhadap kondisi dan tantangan setempat yang mungkin berbeda satu sama lain menjadi hal yang penting (Ashari, 2018). Strategi pembangunan daerah merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang baik dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang sukses dan tepat waktu, sehingga menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien. Pengembangan strategi yang tepat untuk suatu negara atau wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapinya. Misalnya, kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia dapat membantu dalam mencapai tujuan dan mempertahankan pembangunan daerah.

6. Konsep Pengembangan Manusia

a. Konsep Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang terkadang dikenal sebagai Global Goals (Tujuan Global), adalah tujuan universal yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan manusia (www.undp.org). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didasarkan pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pengetahuan

dan peluang. Untuk mencapai tujuan ini, konsep SDGs mencakup poin-poin pembangunan tertentu seperti:

- 1) *No Poverty* (Pengentasan Kemiskinan)
- 2) *Zero Hunger* (Pengentasan Kelaparan)
- 3) *Good Health and Well-Being* (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan)
- 4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas)
- 5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)
- 6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi)
- 7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)
- 8) *Decent Work and Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak)
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
- 10) *Reduced Inequalities* (Mengurangi Kesenjangan)
- 11) *Sustainable Cities and Communities* (Keberlanjutan Kota dan Komunitas)
- 12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)
- 13) *Climate Action* (Aksi terhadap Iklim)
- 14) *Life Below Water* (Kehidupan Bawah Laut)
- 15) *Life on Land* (Kehidupan di Darat)
- 16) *Peace, Justice and Strong Institutions* (Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian)

17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Pengembangan point-point yang disebutkan di atas dievaluasi lebih lanjut berdasarkan 169 target spesifik dan batasan waktu. SDGs pertama kali diumumkan pada 21 Oktober 2015, untuk menggantikan MDGs sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan hingga 2030, sebagaimana disepakati oleh beberapa negara dalam Forum Pan-Bangsa. SDGs bertujuan untuk mendorong kerja sama di antara 193 negara yang terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses yang memperluas pilihan masyarakat. Konsep atau definisi pembangunan manusia pada hakikatnya mempunyai cakupan yang luas (Suriadi, 2019). Dari konseptual pembangunan manusia, pertumbuhan wajib dianalisis dan dipahami berdasarkan sudut pandang individu, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Laporan Pembangunan Manusia UNDP, faktor terpenting dalam pembangunan manusia adalah :

- a. Pembangunan harus mengutamakan manusia sebagai tujuan utama.
- b. Pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat, bukan hanya meningkatkan pendapatannya. Karena sebab itu, konseptual pembangunan manusia wajib didasarkan pada keseluruhan penduduk, bukan hanya faktor ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia tidak sekedar fokus pada peningkatan intelektualitas, namun juga memaksimalkan kemampuan tersebut.

Menurut Michael PH (Suriadi, 2019), Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perkembangan sosial ekonomi suatu negara, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang cukup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga dikenal sebagai IPM, merupakan indikator penting pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang hanya berfokus pada faktor ekonomi. Lebih jauh lagi, kemiskinan tidak hanya memengaruhi ekonomi tetapi juga faktor sosial seperti pendidikan dan status kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, indeks IPM dikembangkan dengan menggabungkan tiga aspek penting kesejahteraan manusia: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut UNDP (2001), komponen-komponen IPM adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesehatan, diukur dengan Umur Harapan Hidup (X_1).
- b. Tingkat pendidikan diukur dari persentase melek huruf orang dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (bobot sepertiga) (X_2).
- c. Daya beli (purchasing power) yang diukur dari pengeluaran (konsumsi) per kapita masyarakat (X_3).

Pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan metodologi IPM, dan pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi baru (Metode IPM Baru) diterapkan. Penyempurnaan metode baru dilakukan karena beberapa indikator tidak sesuai untuk digunakan dalam perhitungan IPM, seperti:

- 1) Angka melek huruf tidak lagi relevan dalam mengevaluasi pendidikan secara jelas dan ringkas karena tidak mampu

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar negara telah mencapai tingkat yang tinggi, maka tidak mungkin untuk secara akurat mewakili tingkat pendidikan di seluruh wilayah.

- 2) PNB (Pendapatan Nasional Bruto) per kapita digunakan karena PDB per kapita tidak dapat menggambarkan kesejahteraan umum suatu daerah.
- 3) Selain itu, metode IPM tradisional menggunakan rumus aritmatika rata-rata dalam analisisnya untuk menggambarkan bahwa tingkat kinerja yang tinggi dalam satu dimensi dapat dikaitkan dengan tingkat kinerja yang tinggi dalam dimensi lain. Penggunaan rata-rata geometris dalam analisis IPM dapat menunjukkan bahwa kapasitas satu dimensi tidak dapat digantikan oleh kapasitas di dimensi lain.

IPM merupakan indeks gabungan yang dihitung dengan menggunakan geometri rata-rata dan terdiri dari: indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran} \times 100}$$

Indeks hitungan dari masing-masing komponen tersebut adalah 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam bagian ini, indeks dinyatakan dalam ratusan (100) untuk memudahkan penelitian, mirip dengan apa yang direkomendasikan BPS (BPS-UNDP, 1996).

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \min}{X(i) \max - X(i) \min}$$

Ket : X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)

X(i) maks : Nilai maksimum X(i)

X(i) min : Nilai minimal X(i)

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori seperti pada uraian berikut

- 1) Very high : untuk nilai IPM ≥ 80
- 2) High : $70 \leq \text{nilai IPM} < 80$
- 3) Medium : $60 \leq \text{nilai IPM} < 70$
- 4) Low : nilai IPM < 60

Untuk menghitung indeks setiap komponen indeks (IPM).

Tabel 2. 3 Batas Maximum Dan Minimum

Komponen IPM	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 *(Rupiah)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 **(Rupiah)

Sumber : IPM Kabupaten Takalar Angka 2022

Keterangan :

*Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yakni di Talikara-Papua

**Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang proyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Menurut UNDP (Septiani 2019) untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah produktivitas, pemerataan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Berikut rincian kegiatannya:

a. Produktivitas

Penduduk dapat meningkatkan produktivitas, berpartisipasi dalam proses penentuan pendapatan, dan menunjang kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembangunan ekonomi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Setiap individu memiliki peluang dan akses yang sama terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Untuk memaksimalkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup, penting untuk memprioritaskan tugas-tugas yang meminimalkan waktu yang diperlukan untuk akses.

c. Kesetaraan

Tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial perlu diprioritaskan. Setiap jenis informasi, baik informasi lingkungan, manusia, atau fisik, perlu terus diperbarui.

d. Pemberdayaan

Memahami gaya hidup mereka sendiri, individu harus berpartisipasi dan bekerja secara kolaboratif. Penting juga untuk mempertimbangkan manfaat proses pembangunan bagi individu.

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistika Sulawesi selatan 2023 Metode agregasi IPM mengalami transformasi dari aritmatika menjadi geometri. Metode agregasi untuk data pendidikan telah berevolusi dari geometri menjadi aritmatika.

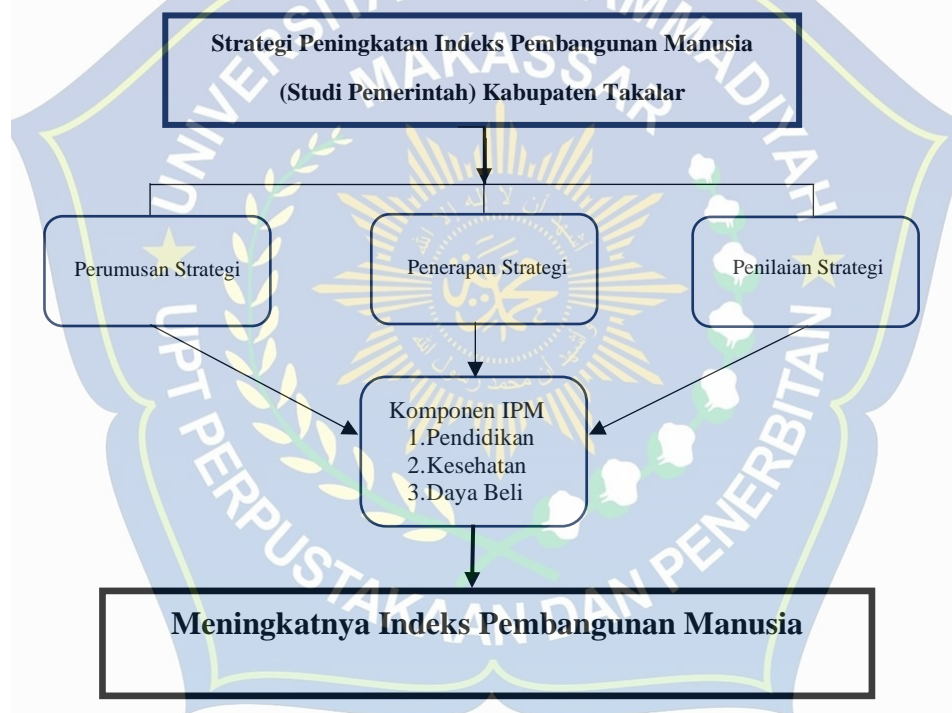


Gambar 2. 2 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia

Sama halnya dengan manusia selalu berevolusi, Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1990, telah ada enam putaran penelitian PHT. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2010. Sedangkan pada metodologi untuk hasil long from sensus penduduk (SP) 2020 baru berjalan di tahun 2024. Dalam hal indikator Indeks Pembangunan Manusia, telah terjadi perubahan dalam metode pengukuran sejak tahun 2014. Silakan lihat Gambar 3.1 untuk informasi lebih lanjut tentang indeks pembangunan manusia.

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagaimana Strategi Pemerintah daerah dalam hal tersebut, mengidentifikasi berdasarkan indikator Strategi teori (David & R, 2009), Perumusan Strategi, Penerapan Strategi dan Penilaian Strategi dengan fokus penelitian komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia UNDP (2001) Kesehatan, Pendidikan, dan Daya Beli, sebagai tujuan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat, manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari Situasi ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Betapa pentingnya fokus penelitian tersebut, maka menjadi fokus penelitian ini adalah Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pemerintah) Kabupaten Takalar menggunakan teori strategi oleh (David & R, 2009) yakni, Perumusan Strategi, Penerapan Strategi, dan Penilaian Strategi.

Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Takalar. Fokus ini bersumber dari komponen indeks pembangunan manusia (IPM). Fokus ini dipilih karena komponen utama untuk meningkatkan kualitas manusia adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi dapat dilihat berdasarkan pengembangan Visi dan misi, penganalisis ancaman eksternal pemerintah dalam menjalankan strategi, kesadaran terhadap sumberdaya kemudian menetapkan tujuan jangka Panjang dan memerhatikan isu-isu strategi dalam menentukan bisnis apa yang tidak dijalankan serta menganalisis kebijakan yang ada di pemerintahan Kabupaten Takalar. Artinya pemerintah mengetahui kondisi eksternal dan internal lingkungan mereka dengan mengamatinya kemudian merumuskan strategi.

2. Penerapan Strategi

Penerapan strategi mencakup bagaimana pemerintah Kabupaten Takalar mampu mengembangkan budaya yang support terhadap strategi, membuat

struktur organisasi yang mencakup nilai yang lebih efektif, mengarahkan ulang upaya dalam memasarkan prodak industri internal, mempersiapkan anggaran yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan juga mengembangkan sistem informasi yang ada.

3. Penilaian Strategi

Penilaian strategi atau evaluasi merupakan tahap akhir Dimana pemerintah Kabupaten Takalar mampu mengetahui kapan Ketika strategi yang tertentu tidak berjalan dengan baik.

Ada Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah 1) peninjauan ulang faktor faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, 2) pengukuran kinerja, dan 3) pengambilan langkah kolektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul yang ditetapkan, penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Takalar. Dipilihnya lokasi ini karna penulis ingin mengetahui Strategi serta Faktor yang mempengaruhi IPM di Kabupaten Takalar.

Lokasi penelitian adalah lokasi tempat peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data yang akurat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Takalar, dan lokasi penelitian meliputi beberapa instansi terkait, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Takalar
6. Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

Mengapa peneliti berfikir untuk melakukan penelitian di Kabupaten Takalar didasarkan pada fakta bahwa kabupaten ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan sumber data UHH SP2010 di provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada peringkat ke-22 dari 24 kabupaten di tahun 2023 dan kemudian

meningkat pada tahun 2024 berdasarkan sumber data UHH Long From SP2020 naik ke peringkat 18 dari 24 kabupaten dengan nilai. Dari penelitian ini adalah dapat mengetahui perbandingan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Takalar dengan 24 kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

Alasan melakukan penelitian di berbagai lembaga adalah karena mereka memiliki data dan terkait dengan pembangunan manusia, sehingga berguna untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif Kualitatif ini adalah untuk memberikan wawasan tentang suatu fenomena atau pola tertentu. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tingginya tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Takalar dan strategi pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mely G. Tan dalam Silalahi (2009) bahwa, penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui secara akurat ciri-ciri individu, peristiwa, atau kelompok, serta seberapa sering atau seringnya kejadian suatu peristiwa tertentu terjadi di Masyarakat.

Menurut Endriani dalam (Creswell & W, 2016), definisi penelitian kualitatif adalah, Penelitian kualitatif adalah metode untuk menganalisis dan memahami makna dari sekelompok orang yang sedang mengalami masalah sosial atau psikologis. Penelitian kualitatif melibatkan tugas-tugas penting seperti menjawab pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan relevan, melakukan

analisis data secara mendalam dari topik-topik khusus hingga umum, dan menganalisis data.

Penelitian kualitatif akan membantu dalam menganalisis dan menafsirkan fenomena yang terkait dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar. Selain itu, mengetahui penyebab indeks Pembangunan manusia Kabupaten Takalar berada pada tingkat sedang dan lebih kecil dari beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Data penelitian kualitatif adalah informasi yang dapat memberikan wawasan tentang suatu topik yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2012).

1. Data Primer

Menurut Silalahi (Sugiyono, 2012), sumber primer mengacu pada "informasi langsung" atau konten asli dari penulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan informasi. Informan dianggap sebagai orang yang paling mengetahui situasi yang sedang dihadapi. Jumlah informasi yang dikumpulkan bergantung pada waktu, lokasi, dan tingkat pemahaman terhadap masalah yang sedang diselidiki.

2. Data Sekunder

Menurut Silalahi (Sugiyono, 2012), data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan dari sumber lain sebelum penelitian. Data penelitian ini meliputi penelitian sejarah, profil Kabupaten Takalar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Takalar, dan dokumen lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah anggota kunci dari kelompok yang berfungsi sebagai fasilitator dan mentor bagi mahasiswa menghadapi tantangan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan informasi karena dipahami atau tersedia dengan baik. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel subjektif dengan tujuan tertentu yang menjamin informasi dikumpulkan relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung (Albashita, 2022). Adapun yang akan menjadi Informan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Instansi	Informan	Jabatan
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar	Arifin,S.AP.,M.AP (Ari)	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar	Dewi Intansari (DI)	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistika Kabupaten Takalar
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Takalar	Karlinda (Ka)	Kepala Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten takalar
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar	Mursalim, SE.,MM. (Ms)	Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar
5.	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	H.A.Amil Amrillah.J.Sangaji, S.STP.,SH.,M.A.P. (AA)	Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi , UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

No.	Instansi	Informan	Jabatan
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar	Ninik (Ni)	Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
		Arman (Ar)	Staf bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

E. Teknik Pengumpulan Data

Selama proses pengumpulan informasi, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh komprehensif, akurat, dan dapat dipahami. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini (Albashita, 2022).

1. Observasi (*Observation*)

Menurut Sugiyono (Albashita, 2022), observasi merupakan suatu proses kompleks yang memadukan beberapa proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan datanya didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku manusia, proses, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kajian ini mengkaji Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Cholid Narkubo (Albashita, 2022). Wawancara adalah proses pengumpulan data dan menjawab pertanyaan. Menurut Cholid, Wawancara adalah proses mengajukan pertanyaan selama percakapan antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan. Wawancara terhadap responden/informan dilakukan dengan menggunakan pedoman survei atau wawancara. Jenis wawancara menggunakan pedoman wawancara, yang

termasuk semi-terstruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data melalui survei guna mendapatkan wawasan mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Takalar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan suatu masalah atau fokus penelitian. Pertanyaan peneliti disesuaikan dengan kuesioner yang telah dibuat, yang kemudian akan diperbarui dengan informasi baru. Data yang dikumpulkan dari narasumber kemudian dianalisis, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat deskriptif/transkripsi.

3. Dokumen (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosiologi. Selain observasi dan pengumpulan data selama penelitian kualitatif, dokumentasi juga digunakan. Teknik pengumpulan data melibatkan penangkapan dan pemanfaatan data atau dokumen yang relevan dari lembaga penelitian (Bungin & Burhan, 2007). Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi profil organisasi, dokumen proyek, dan rencana kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar; Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar; Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar; Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar; Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar; serta dokumen lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik atau metode untuk mengorganisasikan dan mengubah data menjadi suatu hasil yang sah dan dapat dipahami. Data yang terkumpul selama penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk laporan serta disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Humberman (Hardani 2020) sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas data atau menggunakan pengkodean sehingga dapat mengambil data yang pokok dan penting sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk representasi informasi melalui presentasi singkat dengan jelas sehingga dapat dibaca dan dianalisis memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Pada tahapan ini yaitu penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan perlu dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam mengumpulkan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengumpulan data merupakan komponen penting dalam penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menilai kualitas data. Menurut Moleong dalam (Bungin & Burhan, 2007), teknik analisis data meliputi "partisipasi yang diperluas, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensial, tinjauan kasus negatif, pemeriksaan anggota, deskripsi terperinci, audit ketergantungan, dan audit kepastian". Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan triangulasi informasi. Triangulasi data digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas data dengan menganalisis berbagai fenomena, data, dan informasi menggunakan beberapa metode dan ringkasan. Ada tiga jenis triangulasi yang dapat dilakukan peneliti:

1. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan menggunakan data hasil wawancara dengan observasi, apa yang disampaikan dengan situasi penelitian sepanjang waktu, pandangan, dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, serta menggunakan hasil wawancara dengan dokumentasi terkait.
2. Triangulasi Metode, digunakan untuk mengevaluasi metode pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi Teoritis, melibatkan identifikasi pola, koneksi, dan wawasan yang diperoleh dari analisis untuk menemukan pola.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar sendiri secara umum merupakan wilayah pantai, daratan dan perbukitan. Terdapat satu pulau yang terpisah dari daerah Kabupaten Takalar tetapi masuk dalam wilayah pemerintah Takalar ialah kepulauan Tanakeke.

a. Aspek Geografi

Secara administratif Kabupaten Takalar berbatasan dengan: Utara: Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Timur: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, Selatan: Laut Flores, dan Barat: Selat Makassar.

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Takalar

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Jumlah Desa	Luas Total Area (km ² /sq.km)
Mangarabombang	Mangadu	12	100,50
Mappakasunggu	Cilallang	4	15,12
Sanrobone	Sanrobone	6	29,36
Kepulauan Tanakeke	Maccini Baji	5	30,15
Polombangkeng Selatan	Bulukunyi	10	88,07
Pattallassang	Pattallassang	9	25,31
Polombangkeng Utara	Palleko	18	212,25
Galesong Selatan	Bonto Kassi	12	24,71
Galesong	Galesong Kota	14	25,93
Galesong Utara	Bonto Lebang	10	15,11
Takalar	Pattallassang	112	566,51

Sumber : BPS Takalar Dalam Angka 2024

Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 566,51 Km² di atas mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Takalar yang terbagi menjadi 10 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng Utara ibu kota Palleko merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Takalar dengan luas 212,25 km², sedangkan kecamatan yang wilayahnya kecil ialah Galesong Utara dengan luas 15,11 km².

Kondisi Topografi Kabupaten Takalar terbagi menjadi tiga wilayah: dataran tinggi, lembah, dan dataran rendah. Di bagian selatan, terdapat dataran pantai dan dataran rendah dengan kisaran 0-3 derajat dan kisaran 0-25 m, dengan dataran geomorfologi yang didominasi oleh aluvial, pantai rawa, batu gamping, terumbu, dan tufa, serta beberapa batuan dasar lelehan basal. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar ditutupi oleh pantai, yang membentang sepanjang 74 Km dan meliputi desa Mangarabombang, Mappakasunggu, SandraBone, Galesong Selatan, Galesong Kota, dan Galesong Utara. Takalar dibatasi oleh empat sungai: Jeneberang, Jenetallasa, Pamakkulu, dan Jenemarrung. Ada 13.183 Ha lahan yang tersedia untuk irigasi sawah di daerah ini. Kabupaten Takalar terletak antara 5°031' sampai 5°0381' Lintang Selatan dan antara 199°0221' sampai 199°0391' Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km², yang terdiri:

- 1) Kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%)
- 2) Sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%)
- 3) Perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%)
- 4) Tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%)
- 5) Tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%)

- 6) Kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%)
- 7) Pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%)
- 8) Dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%)

Berdasarkan klasifikasi Koppen, wilayah Takalar tergolong muson tropis (Am) dengan dua jenis musim yang dipengaruhi migrasi muson: penghujan dan kemarau. Musim kemarau di wilayah kabupaten ini dipengaruhi oleh angin muson timur-tenggara yang bersifat kering serta dingin, dan periode angin muson ini berlangsung pada bulan Mei hingga bulan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus untuk curah hujan bulanannya bernilai kurang dari 15 mm per bulan. Selanjutnya, musim penghujan di wilayah kabupaten Takalar disebabkan oleh angin muson barat laut-barat daya bersifat lembab dan basah, dan periode angin muson ini terjadi pada bulan November hingga bulan April, dengan bulan terbasah adalah Januari, yang curah hujannya lebih dari 600 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Takalar berkisar antara 2.300–3.100 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Takalar berada pada angka 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar $\pm 81\%$ (Sumber: https://takalarkab.go.id/pg-kj32sc-letak_geografis).

b. Aspek Demografi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Takalar diperkirakan mencapai 305.077 jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk Takalar meningkat sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2021. Rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 95,55 persen, yang berarti terdapat 95 hingga 96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (BPS Publikasi Takalar, 2023).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka tingkat pelayanan yang diberikan juga akan meningkat. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 539 jiwa/Km². Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Galesong Utara, yakni sekitar 2.788 jiwa/Km². Selanjutnya, kota dengan kepadatan daratan tertinggi berada di Tanakeke, yakni 234 jiwa/Km². Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Berdasarkan Angka tahun 2023.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Perkecamatan Tahun 2020 - 2023

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023
1	Mangarabombang	41.085	41.350	41.688	44.904
2	Mappakasunggu	9.461	9.494	9.543	10.477
3	Sanrobone	15.257	15.394	15.559	17.094
4	Kepulauan Tanakeke	6.984	7.008	7.045	7.810
5	Polombangkeng Selatan	29.237	29.356	29.526	31.061
6	Pattallassang	39.275	39.566	39.928	41.628
7	Polombangkeng Utara	50.255	50.476	50.788	53.893
8	Galesong Selatan	26.985	27.186	27.435	29.533
9	Galesong	41.003	41.186	41.411	45.035
10	Galesong Utara	41.311	41.679	42.124	44.609
		300.853	302.695	305.077	326.044

Sumber BPS : Takalar Angka 2024

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Takalar pada tahun 2019 yang sebanyak 298.688 jiwa, jumlah penduduk Takalar pada tahun 2020 diperkirakan bertambah sebanyak 2.165 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2021 diperkirakan bertambah sebanyak 1.842 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2020 sebanyak 300.853 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebanyak 302.695 jiwa, maka jumlah penduduk Takalar pada tahun 2022 bertambah sebanyak 2.382 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di tahun 2023

mencapai 326.044 artinya jumlah penduduk bertambah sebanyak 20.967 dari tahun 2022. Jumlah penduduk yang besar pada setiap tahunnya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Setiap aspek proyek, terutama taraf hidup, turut menyumbang pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan 2023. Indikator yang menunjukkan laju pertumbuhan adalah Pengeluaran Riil per Kapita, yang sekitar 3,60 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,20 persen. Sebaliknya, Umur Harapan Hidup (UHH) sedikit menurun, dari 0,40 persen menjadi 0,31 persen. Laju pertumbuhan Lama Sekolah (RLS) juga menurun, dari 2,01 persen menjadi 1,51 persen. Hingga saat ini, Harapan Lama Sekolah (HLS) telah tumbuh sebesar 0,07 persen sejak tahun lalu (BPS Publikasi Sulawesi Selatan, 2023).

Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 menggunakan UHH hasil SP2010 dan UHH hasil Long From SP2020.

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (UHH SP2010)					Indeks Pembangunan Manusia (UHH LF SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	72.93	73.3	73.81	74.36	75.03	73.67	74.03	74.52	75.04	75.68
Sulawesi Tengah	69.55	69.79	70.28	70.95	71.56	70.31	70.54	71.01	71.66	72.24
Sulawesi Selatan	71.93	72.24	72.82	73.46	74.05	73.08	73.38	73.96	74.6	75.18
Sulawesi Tenggara	71.45	71.66	72.23	72.79	73.48	71.61	71.82	72.38	72.94	73.62
Gorontalo	68.68	69	69.81	70.45	71.23	69.51	69.82	70.62	71.25	72.01
Sulawesi Barat	66.11	66.36	66.92	67.55	68.2	68.4	68.64	69.19	69.8	70.46
INDONESIA	71,94	72,29	72.91	73.55	74.2	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistika) Sulawesi 2025.

Berdasarkan data BPS diatas untuk indeks pembangunan manusia berdasarkan UHH SP 2010, Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang indeks Pembangunannya lebih produktif yang dimana menjadi salah satu indeks pembangunan yang tertinggi diantara provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi yakni berada pada peringkat 2 dari 6 provinsi. Peringkat tersebut masih dipegang selama 5 tahun terakhir. Adapun nilai tertinggi yang didapat Sulawesi Selatan sejak 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2023 dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,05 ditahun 2024. Artinya dalam kurun waktu 2020 – 2024 ada peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan. Begitupun dengan UHH Long From SP2020 sulawesi selatan berhasil menempatkan dirinya di peringkat ke 2 selama 5 tahun berturut – turut dengan nilai 75,18 ditahun 2024.

Adanya peningkatan pertumbuhan yang signifikan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 – 2024 untuk UHH hasil SP 2010 hampir mencapai rata – rata IPM Indonesia yaitu 74,05 di tahun 2024 dengan IPM rata – rata indonesia yaitu 74,20 di tahun 2024. Sedangkan untuk UHH hasil Long From SP2020 provinsi Sulawesi Selatan berhasil melewati rata – rata IPM indonesia dengan nilai 75,18 di tahun 2024 dengan IPM rata – rata Indonesia 75,02 di tahun 2024. Nilai IPM di Sulawesi Selatan tersebut diperoleh dari akumulasi nilai IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut data IPM Sulawesi Selatan jika dikelompokkan berdasarkan provinsi atau kota:

Tabel 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten Tahun 2020 – 2024 menggunakan UHH hasil SP2010 dan UHH hasil Long From SP2020.

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (UHH SP 2010)					Indeks Pembangunan Manusia (UHH LF SP 2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Selayar	67.38	67.76	68.35	69.20	70.03	69.29	69.68	70.27	71.13	71.98
Bulukumba	68.99	69.62	70.34	71.21	71.97	71.37	72.02	72.75	73.64	74.43
Bantaeng	68.73	68.99	69.69	70.57	71.48	69.45	69.71	70.41	71.28	72.20
Jeneponto	64.26	64.56	65.13	65.90	66.38	67.22	67.54	68.13	68.95	69.45
Takalar	67.31	67.72	68.31	68.90	69.47	69.84	70.25	70.86	71.46	72.06
Gowa	70.14	70.29	70.99	71.57	72.26	71.58	71.74	72.44	73.01	73.71
Sinjai	67.60	67.75	68.33	68.92	69.52	69.86	70.02	70.6	71.20	71.81
Maros	69.86	70.41	71.00	71.63	72.11	71.77	72.32	72.92	73.56	74.04
Pangkajene dan Kepulauan	68.72	69.21	69.79	70.59	71.22	71.31	71.81	72.41	73.23	73.87
Barru	71.00	71.13	71.53	72.36	73.06	72.43	72.56	72.96	73.80	74.51
Bone	66.06	66.4	67.01	67.81	68.36	68.46	68.81	69.43	70.25	70.81
Soppeng	68.67	68.99	69.70	70.58	71.39	70.01	70.33	71.05	71.94	72.76
Wajo	69.15	69.62	70.26	71.10	71.52	71.57	72.05	72.69	73.56	73.98
Sindereng Rappang	71.21	71.54	72.06	72.71	73.21	73.07	73.39	73.81	74.38	74.81
Pinrang	71.26	71.45	71.97	72.84	73.55	73.27	73.46	73.9	74.70	75.43
Enrekang	72.76	72.91	73.39	73.89	74.61	73.98	74.13	74.61	75.11	75.83
Luwu	70.51	70.85	71.36	72.16	72.79	71.58	71.92	72.42	73.23	73.86
Tana Toraja	68.75	69.49	69.88	70.73	71.67	69.05	69.78	70.16	71.01	71.94
Luwu Utara	69.57	70.02	70.51	71.34	72.07	71.53	71.99	72.48	73.31	74.04
Luwu Timur	73.22	73.34	73.92	74.35	74.95	74.71	74.83	75.41	75.84	76.44
Toraja Utara	69.33	69.75	70.36	71.23	71.85	69.8	70.22	70.83	71.69	72.31
Makassar	82.25	82.66	83.12	83.52	83.9	83.58	84	84.45	84.85	85.23
Parepare	77.86	78.21	78.54	79.03	79.64	79.20	79.56	79.87	80.36	80.97
Palopo	78.06	78.38	78.91	79.45	79.94	79.39	79.72	80.24	80.77	81.25
Sulawesi Selatan	71.93	72.24	72.82	73.46	74.05	73.08	73.38	73.96	74.6	75.18

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2025

Berdasarkan hasil data BPS diatas, untuk Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan UHH hasil SP 2010 Takalar berada pada peringkat 22 dari 24 kabupaten dengan nilai 68,90 relatif rendah dari nilai rata – rata IPM Sulawesi Selatan 73,46 itu di hitung dari tahun 2020-2023. hasil ini membuktikan bahwa IPM

yang ada ditakalar masih dalam proses pengembangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan daerahnya terbukti pada dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni kisaran dari 0,41 - 0,59 setiap tahunnya. Masih lebih tinggi dari daerah tetangga seperti jeneponto dengan nilai IPM 65,90. Jika disandingkan berdasarkan kriteria Indeks Pembangunan Manusia Menurut UNDP takalar masuk pada kategori Sedang dengan rentang nilai $60 \geq \text{IPM} < 79$. Berikut paparan analisis awal terhadap indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Takalar.

Sedangkan berdasarkan UHH hasil Long From SP 2020, yang saat ini digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusianya masih sama menggunakan HLS, RLS, dan pengeluaran rill perkapita yang disesuaikan Takalar mengalami peningkatan yang dulunya berada pada peringkat ke-22 naik ke peringkat 18 dari 24 kabupaten dengan nilai 71,46 di tahun 2023 yang kemudian tetap meningkat angkanya ditahun 2024 dengan angka 72,06. Ini artinya kabupaten Takalar dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan tentunya dan ini menjadi pertanyaan apakah indeks pembangunan manusia di kabupaten takalar akan stagnan atau lebih meningkat lagi.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Manusia Di Kabupaten Takalar

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang suatu kegiatan maupun program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian di Kabupaten Takalar terangkum dalam data berikut:

Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Takalar

No	Nama Kecamatan	TK	SD Negeri	SD Swasta	MI Negeri	MI Swasta	SLTP Negeri	SLTP Swasta	MTs Negeri	MTs Swasta	SLTA/SMK Negeri	SLTA/SMK Swasta	MA Negeri	MA Swasta
1	Mangarabombang	3	33	-	1	-	6	-	-	2	1	-	1	-
2	Mappakasunggu	3	10	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1
3	Sanrobone	1	15	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
4	Kepulauan Tanakeke	-	11	-	-	-	8	1	-	-	2	-	2	-
5	Polombangkeng Selatan	2	29	1	-	1	3	1	1	1	1	-	1	-
6	Pattallassang	6	28	2	-	1	3	4	-	4	3	7	3	7
7	Polombangkeng Utara	15	37	1	-	4	7	1	-	5	3	2	3	2
8	Galesong Selatan	2	18	-	-	3	2	-	-	4	1	-	1	-
9	Galesong	6	25	-	1	3	2	2	-	6	1	1	1	1
10	Galesong Utara	2	28	1	-	-	4	-	-	1	1	1	1	1
		40	234	5	2	16	39	9	1	25	13	12	13	12

Sumber ; BPS Takalar Angka 2024

Berdasarkan analisis tabel diatas dapat dilihat bahwa persebaran sarana dan prasarana pendidikan mulai dari TK hingga SLTA/SMK/SMA belum merata di kabupaten Takalar persebarannta disetiap kecamatan terhitung bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki sarana di tingkat SLTA/SMK/SMA dan juga SD swasta dan Madrasah. Total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Takalar tahun 2020-2023 yakni 40 Taman Kanak – kanak, 234 Sekolah Dasar Negeri Inpres, 5 Sekolah Dasar Swasta, 2 Madrasah Ibtidayyah Negeri, 16 Madrasah Ibtidayyah

Swasta, 39 SLTP Negeri, 9 SLTP Swasta, 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri, 25 Madrasah Tsanawiyah Swasta, 13 SLTA/SMK Negeri, 12 SLTA/SMK Swasta, 13 Madrasah Aliyah Negeri, dan 12 Madrasah Aliyah Swasta. Dengan jumlah semua total sarana dan prasarana Pendidikan serta persebarannya di setiap kabupaten. Dapat dilihat juga bahwa proses pemerataan sarana dan prasarana yang ada belum maksimal.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, di Kabupaten Takalar terdapat juga sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar terangkum dalam data berikut:

Tabel 4. 6 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Takalar 2020 – 2024

No	Sarana Kesehatan	Angka/Nilai/Jumlah	Satuan
1	Rumah Sakit Umum	3.00	RS
2	Rumah Sakit Khusus	1.00	RS
3	Puskesmas Rawat Inap	15.00	Puskesmas
4	Puskesmas Non Rawat Inap	2.00	Puskesmas
5	Puskesmas Keliling	19.00	Puskesmas
6	Ambulance Transport	2.00	Ambulance
7	Puskesmas Pembantu	56.00	Puskesmas
8	Apotek	28.00	Apotek
9	Posyandu	494.00	Posyandu
10	Posyandu Aktif	98,49	%
11	Rasio Posyandu/100 Balita	-	
12	Poskesdes	47.00	Poskesdes
13	Polindes	47.00	Polindes
14	Posbindu	110.00	Posbindu
15	Desa Siaga	111.00	Desa Siaga
16	Presentase Desa Siaga	92,79	%
17	Klinik Pratama	6.00	Klinik

Sumber : BPS Takalar Angka 2024 & Data Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah sarana prasarana pendukung kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar tergolong cukup banyak, untuk Rumah sakit umum ada 3 RS Umum dan Rumah Sakit Khusus 1. Kemudian untuk sarana prasarana di kecamatan tentunya ada 15 puskesmas rawat inap, puskesmas non rawat inap 2, puskesmas keliling 19, ambulance transport khusus IGD 2, dan puskesmas pembantu 56 yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Untuk fasilitas pembelian obat 28 apotik yang tersebar di Kabupaten Takalar.

Sementara untuk sarana dan prasarana dibidang perekonomian, di Kabupaten Takalar terdapat beberapa lembaga usaha yang secara rinci terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Jumlah Lembaga Usaha di Kabupaten Takalar

No	Lembaga Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	251	256	265	245	270
2	Jumlah UMKM	58.598	58.600	58.648	58.783	58.831
3	UMKM yang memiliki NIB	2.745	2.964	3.023	3.145	3.338
4	UMKM dengan KUR	9.756	9.869	10.236	10.562	10.924

Sumber : BPS Angka 2024 dan Data Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel diatas bahwa koperasi aktif dari tahun 2020 sebanyak 251 koperasi dan di tahun 2024 sebanyak 270 koperasi. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun 2020 sebanyak 58.598 dan pada tahun 2024 sebanyak 58.831 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) pada tahun 2020 sebanyak 2.745 dan di tahun 2024 sebanyak 3.145 yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2020 sebanyak 9.756 dan di tahun 2024 sebanyak 10.924 yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah peningkatan lembaga usaha di Kabupaten Takalar cenderung stagnan.

3. Gambaran Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan UHH hasil SP 2010 Takalar berada pada peringkat 22 dari 24 kabupaten dengan nilai 68,90 relatif rendah dari nilai rata – rata IPM Sulawesi Selatan 73,46 itu di hitung dari tahun 2020-2023. hasil ini membuktikan bahwa IPM yang ada ditakalar masih dalam proses pengembangan dalam meningkatkan indeks pembangunan daerahnya terbukti pada dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni kisaran dari 0,41 - 0,59 setiap tahunnya. Masih lebih tinggi dari daerah tetangga seperti jeneponto dengan nilai IPM 65,90.

Sedangkan berdasarkan UHH hasil Long From SP 2020, yang saat ini digunakan indikator Indeks pembangunan manusianya masih sama menggunakan HLS, RLS, dan pengeluaran rill perkapita yang disesuaikan Takalar mengalami peningkatan yang dulunya berada pada peringkat ke-22 naik ke peringkat 18 dari 24 kabupaten dengan nilai 71,46 di tahun 2023 yang kemudian tetap meningkat angkanya ditahun 2024 dengan angka 72,06.

Tabel 4. 8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Komponen IPM	2020	2021	2022	2023	2024
UHH SP2010	67,18	67,30	67,64	67,90	68,11
UHH LF SP2020	72,69	72,81	73,16	73,43	73,69
IK SP 2020	81,06	81,25	81,78	82,20	82,60
IK SP 2010	72,58	72,77	73,29	73,69	74,02
HLS	12,41	12,42	12,48	12,49	12,50
RLS	7,29	7,49	7,64	7,66	7,73
IP	58,77	59,47	60,13	60,23	60,49
IPN	71,49	71,75	72,77	73,71	74,88
PRPP	10.454	10.543	10.746	11.239	11.679
IPM SP 2010	67,31	67,72	68,31	68,90	69,47
IPM LF SP 2020	69,84	70,25	70,86	71,46	72,06

Sumber ; BPS Kabupaten Takalar 2024

Ket:

- UHH SP 2010 : Umur Harapan Hidup saat lahir Sensus Penduduk 2010
 UHH LF SP2020 : Umur Harapan Hidup Saat lahir Long From Sensus Penduduk 2020
 IK SP 2010 : Indeks Kesehatan Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010
 IK LF SP 2020 : Indeks Kesehatan Berdasarkan Long From Sensus Penduduk (SP) 2020
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata – Rata Lama Sekolah
 IP : Indeks Pendidikan
 IPN : Indeks Pengeluaran
 PRPP : Pengeluaran Riil Per Kapita / Kemampuan daya beli
 IPM SP2010 : Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Sensus kependudukan 2010 (UHH SP 2010)
 IPM LF SP2020 : Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Long From Sensus Kependudukan 2020 (UHH LF SP 2020)

Berdasarkan dari tabel penggunaan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 diatas bahwa rentan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar berada pada 67 – 69 jika dinilai dengan standar penilaian berdasarkan UNDP kabupaten

takalar berada pada menengah ke-atas. Sedangkan berdasarkan Hasil Long From Sensus Penduduk (SP) 2010 berada pada angka 69 – 72 jika dinilai berdasarkan standar nilai UNDP Kabupaten Takalar berada pada tingkat tinggi.

Jika komponen pembentuknya diidentifikasi pada tabel diatas bahwa diketahui Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2010 Kabupaten Takalar tahun 2020 – 2024 berada pada rentang nilai 67,18 – 68,11. Artinya harapan hidup kabupaten Takalar berada pada rata – rata usia 67 – 68 tahun. Sedangkan Umur Harapan hidup saat lahir hasil long from sensus kependudukan (SP) 2020 kabupaten Takalar tahun 2020 – 2024 berada pada rentang nilai 72,69 – 73,69. Artinya harapan hidup kabupaten Takalar berada pada rata – rata usia 72 – 73 tahun. Ada perbedaan yang cukup banyak yakni diangka 6 tahun ini berdasarkan perbedaan data penduduk yang ada.

Sementara indeks kesehatan berdasarkan hasil Long From sensus penduduk (SP) 2020 kabupaten takalar 81,06 – 82,60 dalam 5 tahun terakhir indeks kesehatan Kabupaten Takalar hanya naik sebesar 1,54 artinya cenderung stagnan tetapi angka ini menurut standar UNDP dan BPS berada pada tingkat sangat tinggi. Sedangkan Indeks Kesehatan berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2010 meenunjukkan angka 72,58 – 74,02 dalam 5 tahun terakhir indeks kesehatan naik sebesar 1,44 artinya cenderung stagnan tetapi angka ini juga berdasarkan standar UNDP dan BPS berada pada tingkatan tinggi.

Terdapat perbedaan signifikan dalam indeks kesehatan antara SP2010 dan SP2020, dengan SP2020 menunjukkan indeks kesehatan yang lebih tinggi daripada SP2010. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hasil dari kedua set data

tersebut. Indeks kesehatan didapat dari hasil akumulasi indeks fertilitas (kemampuan untuk hamil dan berhasil melahirkan bayi hidup), indeks morbiditas (derajat sakit, cedera atau gangguan), dan indeks mortalitas (angka kematian dan kesakitan).

Untuk angka Harapan Lama Sekolah kabupaten Takalar tahun 2020 – 2024 berada pada angka 12,41 – 12,50 itu artinya lama sekolah yang diharapkan masyarakat kabupaten takalar akan dirasakan oleh penduduk usia sekolah (7 – 25 tahun) di masa mendatang 12,41 – 12,50 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMP hingga lulus SMA atau masuk semester 1. Untuk rata – rata lama sekolah (RLS) kabupaten Takalar dari tahun 2020 – 2023 berada pada angka 7,29 – 7,73 yang artinya rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan masyarakat kabupaten Takalar untuk menempuh semua jenis pendidikan oleh usia 15 tahun keatas yang pernah dijalani adalah 7,29 – 7,73 tahun atau setara dengan Lulus Sekolah Dasar (SD) atau memasuki SMP kelas 1. Untuk indeks Pendidikan kabupaten Takalar tahun 2020 – 2024 berada di rentang nilai 58,77 – 60,49. Merupakan nilai akumulasi dari angka harapan sekolah dan rata – rata lama sekolah.

Sedangkan untuk kemampuan daya beli (PRPP) Kabupaten Takalar tahun 2020 – 2024 berada pada rentang nilai 10.454 – 11.679 yang artinya kemampuan daya beli berada pada angka Rp.10.454.000 – Rp.11.679.000 riil/kapita/tahun. Nilai kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Takalar tersebut masih jauh dibatas maximum.

Indeks Pembangunan Manusia ini mengkaji pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan. Indeks ini memberikan informasi tentang bagaimana suatu negara atau wilayah telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia warga negaranya. Dimensi utama Indeks Pembangunan Manusia adalah: Kesehatan (*Health*): Salah satu unsur penting dalam IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Pendidikan (*Education*): Aspek pendidikan mencakup dua indikator utama, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), untuk memberikan gambaran mengenai satuan pendidikan dan akses ke pengetahuan. Standar Hidup/Daya Beli (*Standard of Living*): Standar hidup tercermin melalui pendapatan riil per kapita disesuaikan. Ini digunakan sebagai indikator kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar

Dalam merumuskan strategi dilihat berdasarkan visi misi, isu yang menjadi permasalahan dan juga strategi dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terkhusus berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki peran dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar dari aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli.

Dalam merumuskan strategi Kabupaten Takalar melalui perangkat Sektoral Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melakukan peran dalam menyusun strategi. Pertama, strategi

pemetaan masalah, pemetaanya itu dia menggunakan per indikator yakni pemetaan permasalahan Kesehatan, pemetaan masalah Pendidikan, kemudian pemetaan masalah ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kabupaten Takalar :

“Peran bappelitbangda yakni Menyusun Strategi pertama Strategi pemetaan masalah, pemetaanya itu dia menggunakan per indikator yakni pemetaan permasalahan kesehatan, pemetaan masalah Pendidikan, kemudian pemetaan masalah ekonomi. Dari pemetaan itu dibuatlah rapat koordinasi pemetaan masalah kabupaten takalar. Kemudian dari hasil pemetaan kita mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Lalu membuat skenario, pemantapan kemudian dari skenario beralih ke fokus intervensi” (wawancara bersama Ari 12 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa peran Bappelitbangda sebagai lintas sektoral menyusun strategi dengan menggunakan pemetaan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mana dari rapat itu dibuatkan rapat koordinasi. Kemudian dari hasil pemetaan masalah apa yang harus dibuat dan skenario apa yang harus dilakukan yang kemudian beralih ke fokus intervensi.

a. Aspek Pendidikan

Hal yang pertama perlu dilihat adalah aspek pendidikan dilihat dari nilai Kabupaten Takalar berada pada tingkatan menengah kebawah ini dikarenakan indikator dasar pendukung Indeks Pembangunan Manusia merupakan aspek pendidikan. Hasil wawancara Peneliti dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar bahwa :

“Rata – rata lama sekolah dikabupaten takalar itu hingga ke jenjang SD paling lama sampai tamat kalau tidak salah rata lama sekolahnya itu 7 tahun, karena banyak yang putus sekolah. Ini dari angka rentan 12 - 25 tahun keatas ya. Karena memang kami data ada lebih 3.700 an yang kami temukan putus sekolah dan rentan umurnya 25 an keatas”(Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 8 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwasanya Kabupaten Takalar rata – rata jumlah lama sekolah masyarakatnya untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dialami adalah sebesar 7 tahun atau setara lulus SD & kelas 1 SMP. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Takalar banyak yang putus sekolah di usianya yang rentan 12 – 25 tahun keatas. Dan ditemukan bahwa sekitar 3.700 masyarakat yang putus sekolah. Akibatnya mempengaruhi angka indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar juga menyebutkan bahwa :

“Masyarakat di pesisir itu, begitu mereka bisa mendapatkan uang sudah tidak mau sekolah lagi. Kemudian pola pikir orang tua siswa biar kamu tidak sarjana banyak sarjana diluar sana yang tidak kerja. Kemudian karena tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kemudian ada karena pernikahan dini yang menjadi budaya yang masih ada.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2024).

Inilah yang menjadi budaya yang ada di Kabupaten takalar bahwa rentan usia 12 – 25 tahun keatas berhenti sekolah disebabkan karena kondisi sosial yang ada seperti mencari nafkah terus – menerus sehingga tidak terpikirkan untuk melanjutkan pendidikan hingga selesai. Masalah indeks Pendidikan yang masih tergolong menengah ini sebenarnya bisa dituntaskan tetapi. Masalah terus muncul pada masyarakat itu sendiri dikarenakan kondisi yang disebutkan dan beberapa masalah internal. Hal ini juga disebutkan oleh Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar bahwa:

“Tantangannya juga kalau pendidikan orang yang sudah kerja atau anak yang sudah mendapatkan penghasilan, kita mau ajak untuk sekolah sangat susah. Ada juga anak yang sudah menjadi tulang punggung keluarga bagaimana mau bersekolah sedangkan dia sudah dihadapkan untuk menjadi tulang punggung keluarga, ada juga terkendala soal biaya

karena kalau umur 25 keatas itu dek sudah tidak ditanggung..” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 8 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa kemunduran indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar bersumber dari Sumber Daya Manusia itu sendiri. Meskipun tersedia program dan sumber daya pendidikan, tidak semua warga Sampang berminat untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga karena adanya batasan usia dalam tanggungan pembiayaan oleh pemerintah. Selain itu hasrat keinginan atau biasa di sebut animo pada masyarakat Kabupaten Takalar yang berkembang bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada meskipun masyarakat setempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan perkataan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar bahwa :

“Kemudian pola pikir orang tua siswa biar kamu tidak sarjana banyak sarjana diluar sana yang tidak kerja.” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 8 Oktober 2024).

Pola pikir yang dianut masyarakat Kabupaten Takalar merupakan animo yang berkembang sampai saat ini sehingga luarannya adalah banyak masyarakat yang mengesampingkan pendidikan sebagai sesuatu hal yang tidak perlu. Pada pernyataan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar faktor yang menjadi kendala juga ada pada pendataan :

“sebenarnya dek masalah yang utama itu berada pada dukcapil karena masih banyak masyarakat yang belum mengupdate KK- nya sebenarnya kita semua sudah menyampaikan laporan ke masyarakat itu tidak mengupdate datanya di dukcapil sehingga pendidikan kita masih itu – itu saja, misalnya sudah tamat SMA di KK-nya masih SD itulah penyebabnya” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 5 November 2024).

Pernyataan diatas merupakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam mengelompokkan isu – isu strategis dalam mendata masyarakat dan juga menentukan target yang akan ditangani oleh dinas pendidikan. Adanya ketidaksamaan antara data Kependudukan/KK untuk jenjang pendidikan yang meskinnya harus selalu diperbaharui. Hal ini terus di upayakan oleh Dinas pendidikan yang juga bekerja sama dengan Dinas Pemerintah Desa dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Aspek Kesehatan

Kondisi indeks Pembangunan Manusia untuk indikator pembentuk Indeks Kesehatan merupakan faktor penyebab angka yang menentukan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Takalar bisa meningkat yang saat ini berada pada tingkatan yang cukup tinggi. Salah satu penyebab angka indeks kesehatan adalah efek dari kesadaran dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat takalar. Seperti yang dikatakan Staf Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“sebenarnya kalau angka harapan hidup kabupaten takalar ini sudah tinggi sekitar 72 an. Ini dikarenakan upaya yang telah dijalankan oleh dinas kesehatan memberikan penyuluhan dan beberapa pelatihan khusus kepada kader kesehatan yang ada dipolindes dan poskesdes untuk selalu mengarahkan masyarakat dan memberikan pemahaman apa yang mereka tidak ketahui karena kader kesahatan ini merupakan bagian daripada masyarakat juga. Walaupun untuk kesadaran tentang kesehatan sebenarnya masih banyak masyarakat yang masih mempercayai pengobatan alternatif dan penggunaan obat herbal diluar resep tenaga kesehatan.” (Hasil wawancara bersama Ar pada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyebab meningkatnya angka harapan hidup (UHH) yang ada di Kabupaten Takalar adalah

upaya dinas Kesehatan dalam memberikan beberapa penyuluhan serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terkhusus kader kesehatan yang bertugas di Poskesdes dan Polindes, dimana masyarakat akan diberikan pemahaman bagaimana meningkatkan kesehatan dan juga tentunya beberapa pencegahan penyakit yang membahayakan. Kemudian masyarakat tentunya akan diberikan program – program yang nantinya akan diberitahukan oleh kader dan itu akan didampingi dan membuat masyarakat paham akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga informasi – informasi penting juga dapat tersalurkan. Kemudian tentunya ini juga belum merata karena domino masyarakat terhadap budaya juga masih kental banyak sebagian masyarakat masih mempercayai alternatif pengobatan kampung (dukun) jika dibandingkan dengan pengobatan.

Kondisi tentang kepercayaan itu juga dapat diperparah dengan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Takalar dalam hal ketersediaan air bersih. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut :

“sebenarnya dek untuk ketersediaan air bersih itu di Kabupaten Takalar itu belum merata, dari beberapa kecamatan masih ada yang belum atau masih susah mengakses air bersih biasanya di daerah yang dataran tinggi yang rentan terkena cuaca ekstrem kemarau dan beberapa di wilayah pesisir. Bahkan ada beberapa wilayah yang betul – betul pada saat kemarau itu tidak memiliki persediaan air sama sekali” (Hasil wawancara bersama Ni pada tanggal 17 Oktober 2024).

Tidak meratanya air bersih di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar disebabkan oleh kondisi dataran dan juga iklim yang ada salah satunya adalah yang kondisi dimana beberapa yang tinggal di pesisir kurang mendapat akses air dikarenakan beberapa air memiliki kondisi yang berbeda – beda terhadap

pengaruh perairan yang ada disekitarnya, kemudian untuk masalah yang berada didearah beriklim ekstream yang kadang stok air sama sekali tidak ada akses artinya mengalami kekeringan yang bisa sampai berbulan – bulan. Ini berdasarkan klasifikasi Koppen kabupaten Takalar bahwa wilayah Takalar tergolong muson tropis (Am) dengan dua jenis musim yang dipengaruhi migrasi muson: penghujan dan kemarau. Musim kemarau di wilayah kabupaten ini dipengaruhi oleh angin muson timur-tenggara yang bersifat kering serta dingin pada periode angin muson ini berlangsung pada bulan Mei hingga bulan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus untuk curah hujan bulanannya bernilai kurang dari 15 mm per bulan (Sumber: https://takalarkab.go.id/pg-kj32sc-letak_geografis).

c. Aspek Daya Beli

UNDP mengukur standar hidup berdasarkan PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita, sedangkan BPS mengukur standar hidup berdasarkan tingkat konsumsi per orang atau rata – rata pengeluaran riil per kapita. Menurut BPS (2022), peningkatan proporsi konsumsi pangan dibandingkan dengan konsumsi total dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi indeks ekonomi atau daya beli berada pada angka yang stagnan adalah disebabkan oleh daya beli yang tergolong cukup rendah yakni pada angka 10.454 sampai dengan 11.679 ini pengeluaran riil per kapita. Sedangkan pada Indeks Pengeluaran itu sendiri berada pada angka 71,49 – 74,88 ini berada pada angka yang tinggi. Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama dengan Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar :

“Daya beli di Kabupaten Takalar pasca Covid-19 itu puncaknya mengalami peningkatan berada pada tahun 2023 kabupaten Takalar terus melakukan perbaikan ekonomi sehingga menumbuhkan hasil yang besar yakni 4,59 persen angka ini merupakan capaian tertinggi Kabupaten Takalar dalam 14 tahun terakhir. Satu program yang paling mendukung di tahun itu yaitu program ekonomi kerumunan yang dimana program ini melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri secara meluas tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi nilai pertukaran atau transaksi.” (Hasil wawancara bersama Ari pada tanggal 16 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa aspek daya beli mengalami pencapaian yang cukup signifikan ini dilihat dari capaian nilai yang diperoleh merupakan nilai tertinggi dari 14 tahun terakhir.

Meskipun range pengeluaran riil perkapita di kabupaten takalar masih tergolong rendah berdasarkan standar UNDP dan BPS selain harga jual yang menjadi masalah sehingga keterlibatan Kontribusi PDRB dari sektor pertanian maupun perdagangan cukup tinggi ini sejalan dengan perkataan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar :

“sebenarnya dek berdasarkan dari komposisi penduduk Kabupaten Takalar yang merupakan petani sebesar 70% hingga 80% kontribusi PDRB khususnya dibidang perekonomian itu secara terstruktur masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 50,75 persen. Sedangkan kalau perdagangan kontribusinya ada 12,44 persen untuk reparasi mobil dan motor serta konstruksi sebesar 7,30 persen dari total PDRB.” (Hasil wawancara bersama Ka pada tanggal 5 November 2024).

Diketahui bahwa berdasarkan komposisi masyarakat Kabupaten takalar yang bekerja di sektor pertanian sebesar 50,75 %. Sektor tersebut meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara komposisi penduduk yang bekerja sebagai pedagang 12,44 % dan konstruksi sebesar 7,30 persen dari total PDRB yang ada di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan dari paparan data di atas dapat disimpulkan perumusan strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tertuang pada tabel berikut

Tabel 4. 9 Tabel Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Strategi	Faktor Internal
Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi dinas sektoral Bappelitbangda memiliki peran penting dalam menyusun strategi pemetaan masalah. Dalam hal ini, melakukan pemetaan berdasarkan beberapa indikator utama. Pertama, kami melaksanakan pemetaan permasalahan di bidang kesehatan. Kedua, kami melakukan pemetaan masalah di sektor pendidikan. Ketiga, kami juga menjalankan pemetaan masalah di bidang ekonomi. Semua pemetaan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
Aspek Pendidikan	
1) Putus sekolah di umur 25 keatas. 2) Pemberantasan Putus sekolah melalui pemberian fasilitas formal bagi usia sekolah dan bantuan.	Kabupaten Takalar rata – rata jumlah lama sekolah masyarakatnya untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dialami adalah sebesar 7 tahun atau setara lulus SD & kelas 1 SMP. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Takalar banyak yang putus sekolah di usianya yang rentan 12 – 25 tahun keatas. Dan ditemukan bahwa sekitar 3.700 masyarakat yang putus sekolah. Akibatnya mempengaruhi angka indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar.
Penguatan Pendataan Kartu Kependudukan (KK) masyarakat terkait status pendidikan.	Adanya ketidaksamaan antara data Kependudukan/KK untuk jenjang pendidikan yang meskinnya harus selalu diperbaharui.

Aspek Kesehatan	
Penguatan pelayanan kesehatan sebagai upaya menekan angka kematian.	Diketahui bahwa penyebab meningkatnya angka harapan hidup (UHH) yang ada di Kabupaten Takalar adalah upaya dinas Kesehatan dalam memberikan beberapa penyuluhan serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terkhusus kader kesehatan yang bertugas di Poskesdes dan Polindes, dimana masyarakat akan diberikan pemahaman bagaimana meningkatkan kesehatan dan juga tentunya beberapa pencegahan penyakit yang membahayakan. Kemudian masyarakat tentunya akan diberikan program – program yang nantinya akan diberitahukan oleh kader dan itu akan didampingi dan membuat masyarakat paham akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga informasi – informasi penting juga dapat tersalurkan. Kemudian tentunya ini juga belum merata karena domino masyarakat terhadap budaya juga masih kental banyak sebagian masyarakat masih mempercayai alternatif pengobatan kampung (dukun) jika dibandingkan dengan pengobatan
Penguatan Sarana Dan Prasarana serta program kesehatan untuk menekan angka kematian	kondisi geografis yang ada di Kabupaten takalar dalam hal ketersediaan air bersih. Tidak meratanya air bersih di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar disebabkan oleh kondisi dataran dan juga iklim yang ada salah satunya adalah yang kondisi dimana beberapa yang tinggal dipesisir kurang mendapat akses air dikarenakan beberapa air memiliki kondisi yang berbeda – beda terhadap pengaruh perairan yang ada disekitarnya, kemudian untuk masalah yang berada didearah beriklim ekstream yang kadang stok air sama sekali tidak ada akses artinya mengalami kekeringan yang bisa sampai berbulan – bulan.

Aspek Daya Beli	
Penguatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan aksesibilitas ekonomi, nilai pertukaran atau transaksi	Kabupaten Takalar pasca Covid-19 puncaknya mengalami peningkatan berada pada tahun 2023 kabupaten Takalar terus melakukan perbaikan ekonomi sehingga menumbuhkan hasil yang besar yakni 4,59 persen angka ini merupakan capaian tertinggi Kabupaten Takalar dalam 14 tahun terakhir. Satu program yang paling mendukung di tahun itu yaitu program ekonomi kerumunan yang dimana program ini melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri secara meluas tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi nilai pertukaran atau transaksi
Pemerintah Daerah melakukan penguatan dibidang pertanian dan nelayan tersebut untuk meningkatkan kontribusi PDRB.	Berdasarkan komposisi masyarakat Kabupaten takalar yang bekerja di sektor pertanian sebesar 50,75 %. Sektor tersebut meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara komposisi penduduk yang bekerja sebagai pedagang 12,44 % dan konstruksi sebesar 7,30 persen dari total PDRB yang ada di Kabupaten Takalar.

2. Penerapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar

Berdasarkan perumusan strategi dengan menentukan isu masalah serta mengetahui peran Pemerintah Daerah

a. Aspek Pendidikan

Tabel 4. 10 Tabel Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Pendidikan

Strategi	Penerapan
1) Putus sekolah diumur 25 keatas. 2) Pemberantasan Putus sekolah melalui pemberian fasilitas formal bagi usia sekolah dan bantuan.	1) Pemberian program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi masyarakat miskin dan tidak ingin bersekolah.

	2) Pemberian akses sekolah formal bagi usia sekolah. 3) Pemberian program kejar paket bagi usia yang tidak dapat mengikuti kegiatan formal yakni bagi pekerja atau yang sudah berumur diatas usia sekolah Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PKBM untuk fleksibilitas waktu bagi masyarakat pekerja dan terkendala persoalan waktu dalam mengejar ujian paket.
Penguatan Pendataan Kartu Kependudukan (KK) masyarakat terkait status pendidikan.	Pemberian Pelatihan pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) bagi operator sekolah dan desa.
Program Pendukung	
	Program 1 desa 1 PKBN (program tahun 2018)
	Program Desa Peduli Pendidikan (DPP)
	Kerja sama dengan Unicef.

Kendala-kendala yang dihadapi meskipun sulit diatasi karena faktor yang bersumber dari persepsi masyarakat sendiri, Pemerintah Daerah Takalar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menerus melakukan berbagai kegiatan. Hal ini sejalan dengan perkataan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar bahwa :

“Kami menyelenggarakan pelatihan pendataan bagi operator sekolah dan desa melalui program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Program ini diimplementasikan di seluruh desa dan kelurahan, dengan setiap desa memiliki empat petugas pendata yang telah dilatih khusus” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 5 November 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pelatihan pada usia produktif sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dengan pelatihan Pendataan

untuk operator sekolah melalui pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) bagi seluruh desa dan kelurahan.

Dalam menekan angka putus sekolah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan beberapa upaya hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar bahwa :

“Di Kabupaten Takalar, kami memperbanyak program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C. Program ini memungkinkan masyarakat kurang mampu dan mereka yang tidak bersekolah untuk mengakses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Saat ini, banyak warga berusia 25 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan ini. Untuk peserta didik yang berusia di bawah 25 tahun, mereka dapat memilih untuk mengikuti program PKBM atau pendidikan formal. Adapun untuk lebih dari 2.000 warga yang berusia di atas 25 tahun, kami berencana mengembalikan data mereka ke desa masing-masing pada tahun depan agar dapat difasilitasi pendidikannya di tingkat desa.” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 5 November 2024).

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa kendala yang dialami berada pada rentan usia 25 keatas oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini membuat program yang sudah berjalan yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM ini adalah program dimana masyarakat dikumpulkan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian Paket A, Paket B, dan Paket C dikarenakan PKBM ini fleksibel menyesuaikan waktu masyarakat apalagi yang memiliki kendala pekerjaan dan sesuai untuk mengejar ujian.

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Organisasi Perangkat Daerah yaitu dinas Pendidikan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia untuk kalangan putus sekolah di rentan umur 12 – 25 tahun keatas dengan mengikutkan kejar paket A, paket B, dan paket C yang ditujukan

khusus untuk masyarakat Kabupaten Takalar. Program ini diadakan tentunya untuk memberantas masyarakat yang putus sekolah. Harapannya masyarakat setiap tahunnya dapat menuntaskan pendidikan minimal tamat SMA dan banyak masyarakat yang mengejar ketinggalan pendidikan dengan mengikuti ujian paket yang disediakan program Dinas Pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar:

“Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami melaksanakan beberapa tahapan kegiatan. Pertama, kami mengadakan pelatihan, kemudian melakukan pendataan. Setelah pendataan selesai, kami melakukan konfirmasi ulang terhadap data yang telah kami peroleh untuk memastikan keakuratannya. Setelah data tervalidasi, kami menyerahkannya ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga pendidikan yang kami kembangkan di Takalar, yang menyediakan program Paket A, Paket B, dan Paket C. Melalui PKBM, kami dapat mengakomodasi masyarakat kurang mampu atau mereka yang enggan bersekolah. Strategi ini berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dapat meningkatkan partisipasi sekolah melalui program PKBM. Dari hasil pendataan, kami menemukan lebih dari 3.727 siswa yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah. Mereka kemudian kami arahkan ke jalur pendidikan yang sesuai. Bagi siswa yang masih berusia sekolah, kami arahkan ke pendidikan formal. Sedangkan bagi mereka yang usianya sudah lebih tua dan merasa malu untuk masuk pendidikan formal, kami arahkan ke PKBM. Yang terpenting, semua siswa terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem pembelajaran di PKBM memang berbeda dengan sekolah formal. Pertemuan pembelajaran bisa dilakukan sebulan sekali mengingat peserta didiknya adalah mereka yang awalnya enggan bersekolah. Mereka hanya dipanggil saat akan mengikuti ujian. Tujuan utamanya adalah agar mereka bisa memperoleh ijazah untuk keperluan pekerjaan melalui PKBM” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 8 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diringkas beberapa poin penting sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Takalar menerapkan strategi sistematis untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui PKBM

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Prosesnya dimulai dengan pelatihan dan pendataan yang ketat, dilanjutkan dengan validasi data sebelum diserahkan ke PKBM.

Program ini berhasil mengidentifikasi 3.727 warga yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan. Mereka kemudian diarahkan ke jalur pendidikan yang sesuai - pendidikan formal bagi usia sekolah, dan PKBM bagi mereka yang berusia lebih tua. PKBM menawarkan program Paket A, B, dan C sebagai alternatif pendidikan yang lebih fleksibel, dengan pertemuan yang dapat dilakukan sebulan sekali.

Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Takalar melalui peningkatan partisipasi sekolah. Yang penting, semua peserta didik tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memberikan legitimasi formal pada pendidikan mereka. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap warga memiliki ijazah yang dapat digunakan untuk keperluan pekerjaan, sambil mengakomodasi kendala dan kebutuhan khusus masyarakat yang kurang mampu atau enggan bersekolah. Kemudian selain daripada itu ada berbagai macam program yang telah berjalan sebagai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar seperti yang dikatakan Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar :

“Dalam strategi pendidikan, kami telah mengimplementasikan program penanganan anak usia sekolah dan program penanganan anak tidak bersekolah di Kabupaten Takalar. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa dan UNICEF. Di Kabupaten Takalar, 20% penduduk merupakan anak usia sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk setara dengan kelas 1 SMP, sedangkan harapan lama sekolah setara dengan lulusan SMA hingga Diploma 1. Artinya, target kami adalah siswa yang memulai pendidikan tahun ini diharapkan dapat melanjutkan hingga semester pertama pendidikan tinggi. Capaian Kabupaten Takalar sejak awal 2018 menunjukkan peningkatan signifikan, dari 7 PKBM menjadi 48 PKBM melalui program 1 Desa 1 PKBM. Program lainnya adalah 'Desa Peduli Pendidikan' yang bertujuan memastikan keberlangsungan pendidikan seperti sekolah pada umumnya. Strategi ketiga yang kami terapkan adalah penataan sistem pendataan anak tidak bersekolah melalui aplikasi sistem informasi pendataan” (Hasil wawancara bersama Ari pada tanggal 12 September 2024).



Gambar 4. 1 Satu desa satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun di Takalar (diluncurkan oleh Bupati Takalar, Selasa 29 Juni 2021)

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat dibahas beberapa aspek penting tentang strategi pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah pendidikan melalui dua program utama penanganan anak usia sekolah dan penanganan anak tidak bersekolah. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan kerja sama strategis bersama Kementerian Desa dan UNICEF, menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi masalah pendidikan.

Data demografis menunjukkan bahwa 20% penduduk Takalar adalah anak usia sekolah, dengan rata-rata lama sekolah setara kelas 1 SMP. Namun, penetapan target harapan lama sekolah hingga jenjang Diploma 1 mencerminkan visi ambisius pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Implementasi program ini menunjukkan hasil positif, terlihat dari peningkatan jumlah PKBM yang signifikan dari 7 menjadi 48 unit sejak tahun 2018 melalui program "1 Desa 1 PKBM". Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan hingga ke tingkat desa. Program "Desa Peduli Pendidikan" dan pengembangan sistem informasi pendataan melengkapi strategi ini dengan memastikan keberlangsungan pendidikan dan pendataan yang akurat. Pendekatan sistematis ini mencerminkan upaya komprehensif dalam mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Takalar.

b. Aspek Kesehatan

Tabel 4. 11 Tabel Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Kesehatan

Strategi	Penerapan
Penguatan pelayanan kesehatan sebagai upaya menekan angka kematian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Pelatihan Kompetensi bagi tenaga kesehatan. 2) Pemberian akses kesehatan bagi masyarakat miskin bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal pendataan kemudian setelahnya diberikan kartu orang miskin khusus dibidang kesehatan atau biasa disebut dengan BPJS. 3) Kemudahan akses kesehatan dengan memberikan sistem pendaftaran dan rujukan secara online bagi peserta dengan menggunakan aplikasi. 4) Kemudahan akses kesehatan dengan memberikan sistem pendaftaran dan rujukan secara online bagi peserta dengan menggunakan aplikasi.

Strategi	Penerapan
Penguatan Sarana Dan Prasarana kesehatan untuk menekan angka kematian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) kesehatan yang lebih memadai tercatat bahwa Kabupaten Takalar saat ini ada 17 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu. Kemudian 47 Polindes dan Poskesdes yang merupakan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan, sumber daya-nya sendiri berasal dari masyarakat yang membangun dan merawat kemudian ada tenaga kesehatan yang disiapkan Dinas Kesehatan. 2) Adanya PSC911 yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan dengan gratis seperti pengantaran pasien yang sakit, penjemputan, dan pelayanan dirumah (<i>Home Care</i>) yang mana diberikan obat sebagai penanganan pertama.
Program Pendukung	
Penguatan program yang telah ada.	Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	Imunisasi
	Program penanganan penyakit menular dan tidak menular,
	Pemberantasan gizi buruk atau stunting yang bekerja sama dengan BPKBN.

Beberapa kendala pada aspek Kesehatan sebenarnya bisa diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Secara infrastruktur (sarana dan prasarana) kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar telah memiliki akses kesehatan yang memadai dan cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“Dinas kabupaten Takalar itu ada 17 puskesmas kemudian pustu sekitar 56 puskesmas pembantu dengan masing – masing ada tenaganya, dan 47 polindes atau poskesdes yang merupakan partisipasi daripada masyarakat jadi khusus untuk polindes merupakan partisipasi bidang kesehatan yang bersumberdaya dari masyarakat, jadi masyarakat yang membangun masyarakat yang memelihara dan tenaganya sudah ada dari kita dinas kesehatan.” (Hasil wawancara bersama Ar pada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa infrastruktur (sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar cukup memadai. Berdasarkan data empiris di Kabupaten Takalar terdapat 17 puskesmas dan pustu 48 dengan masing – masing tenaga yang cukup memadai. Kehadiran Puskesmas, Polindes, dan Pustu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Artinya yang tidak terjangkau dapat dilayani di Puskesmas, Polindes, dan Pustu. Hal ini juga menyelesaikan beberapa permasalahan itu dengan adanya beberapa poskesdes dan polindes yang merupakan bentuk bentuk partisipasi masyarakat yang dimana sumberdayanya sendiri berasal dari masyarakat, kemudian masyarakat yang memelihara dan tenaga Kesehatannya merupakan dari Dinas Kesehatan.

Kemudian untuk akses kesehatan masyarakat terhadap sarana dan prasarana tersebut sangat mudah ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“akses kesehatan untuk masyarakat miskin kabupaten Takalar sebenarnya agak mudah karena kita kan puskesmas diujung tombak untuk melakukan pendataan khusus orang – orang miskin kemudian dimasukkan datanya ke Dinas Sosial dan setelah itu masuk ke Dinas kesehatan untuk dibuatkan kartu orang miskin khusus dibidang kesehatan. Kartunya ini memberikan pelayanan ke masyarakat miskin.”
(Hasil wawancara bersama Ar pada tanggal 17 Oktober 2024).

Kemudian hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama dengan

Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar telah menyediakan berbagai kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pertama, seluruh Puskesmas telah dilengkapi dengan sistem pendaftaran online untuk memudahkan pasien. Kedua, kami telah mengimplementasikan sistem rujukan di rumah sakit. Ketiga, untuk masyarakat kurang mampu, tersedia layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, kami juga memiliki layanan PSC911 yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Layanan ini mencakup pengantaran dan penjemputan pasien

menggunakan ambulans, serta pelayanan kesehatan di rumah atau home care, termasuk pemberian obat untuk penanganan pertama. Semua fasilitas ini disediakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang optimal."

(Hasil wawancara berpada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa akses kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar sangat mudah kemudahan akses tersebut menandakan bahwa pelayanan yang dilakukan tidaklah pandang bulu artinya baik itu masyarakat miskin atau kaya mendapatkan akses yang mudah. Jikapun terjadi kendala dilapangan hal tersebut justru berkaitan dengan persyaratan yang dikeluarkan BPJS. Adanya upaya Dinas kesehatan terhadap masyarakat merupakan aksi nyata terhadap peningkatan Indeks Kesehatan, dinas Kesehatan mengumpulkan data Penduduk itu berupa (KTP dan KK) yang kemudian digolongkan ke masyarakat Miskin yang bekerja sama dengan Dinas Sosial sehingga akses yang diberikan lebih mudah hanya menggunakan kartu untuk setiap pelayanan. Kemudian adanya PSC911 atau *home care* menjadikan akses kesehatan ini lebih mudah untuk didapatkan.

Untuk menekan angka kematian juga memerlukan beberapa upaya tentunya hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Kesehatan telah berkomitmen untuk menekan angka kematian, baik itu angka kematian ibu, bayi, maupun penyakit tidak menular lainnya. Salah satu langkah utama yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada di setiap puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Takalar. Dan kami juga telah memperkuat program-program kesehatan yang sudah ada, seperti program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular dan juga permasalahan stunting tentunya yang menjadi fokus utama dan bekerja sama dengan BPKBN. Tentu, kami juga fokus pada program-program pencegahan yang berkaitan dengan pola hidup sehat, seperti kampanye gizi seimbang, program DASHAT, pencegahan merokok, dan peningkatan aktivitas fisik. Kami mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan secara rutin di desa-desa, memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat, menjaga kebersihan, serta menghindari perilaku yang berisiko tinggi. Salah satu program unggulan lainnya adalah gerakan hidup sehat yang bertujuan untuk mencegah penyakit tidak menular melalui perubahan gaya hidup masyarakat.” (Hasil wawancara bersama Ar pada tanggal 17 Oktober 2024).



Gambar 4. 2 Pj Ketua TP PKK Takalat Luncurkan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Jum'at 22 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Pendidikan selain memiliki peran dan juga upaya mereka berkomitmen dalam menekan angka kematian baik dari angka kematian Ibu. Angka kematian Bayi, maupun penyakit menular lainnya. Selain daripada meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar meningkatkan kualitas program – program kesehatan

yang sudah ada, seperti program kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular dan juga memberantas permasalahan gizi atau stunting seperti dapur sehat atasi stunting yang dilakukan bersama dengan BPKBN untuk penyuluhan atau penguatan terhadap masyarakat terhadap stunting.

Pemerintah juga memantau program – program pencegahan dengan mengubah gaya hidup sehat tentunya, memberikan penyuluhan rutin di desa – desa, memberikan edukasi tentang pentingnya hidup sehat, menghindari perilaku yang beresiko dan salah satu program unggulan lainnya adalah gerakan hidup sehat yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah penyakit menular melalui perubahan gaya hidup masyarakat.

c. Aspek Daya Beli

Tabel 4. 12 Penerapan Strategi Berdasarkan Aspek Daya Beli

Strategi	Penerapan
Penguatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan aksesibilitas ekonomi, nilai pertukaran atau transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah melakukan pendampingan kompetensi Koperasi dan UMKM yang anggaran-nya berasal dari dana alokasi khusus atau PK2UMK oleh kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2) Bekerja sama dengan daerah lain terhadap akses perdagangan pangan seperti cabai Pemerintah Kabupaten Takalar bekerja sama dengan Kabupaten Wajo. 3) Pemberian modal dengan menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM 4) Penguatan dibidang <i>home industry</i> agar dapat bersaing dengan pasar global.
Pemerintah Daerah melakukan penguatan dibidang pertanian dan nelayan tersebut untuk meningkatkan kontribusi PDRB.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kompetensi wirausaha baru bagi petani dan nelayan dengan mengembangkan kompetensi UMKM disektor Petani dan Nelayan. Yang kemudian dilatih digitalisasi (<i>digital marketing</i>) bagi petani dan nelayan.

	<p>2) Bekerja sama dengan daerah lain terhadap akses perdagangan pangan seperti cabai Pemerintah Kabupaten Takalar bekerja sama dengan Kabupaten Wajo.</p> <p>3) Ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, maupun sektor swasta seperti bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi akses pasar bagi produk lokal.</p>
Program Pendukung	
Kolaborasi	Bekerja sama dengan perusahaan besar yang memiliki program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yakni program bantuan perlengkapan sekolah dari Mercure Makassar Nexa Pettarani kepada SMK YAPTA dan bantuan rumput laut dari Nindya Karya kepada kelompok nelayan di desa Laikang.

Meskipun harga barang konsumsi tinggi dan berdampak pada PDRB, Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan berbagai inisiatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar :

“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Dalam hal ini, Koperasi dan UMKM berperan penting di sektor perekonomian. Bukti konkret dari peran UMKM dapat kita lihat selama masa pandemi Covid-19, di mana UMKM Kabupaten Takalar mampu bertahan dalam kondisi yang sangat menantang tersebut. Hingga saat ini, perekonomian masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan Koperasi, tetap stabil. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia pada indikator perekonomian. Pemerintah melalui dinas terkait juga terus memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Kabupaten Takalar mendapatkan program pendampingan Koperasi dan UMKM yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus PK2UMK dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Program ini mencakup pendampingan Koperasi dan UMKM serta berbagai pelatihan untuk pengembangan kompetensi di sektor tersebut.” (Hasil wawancara bersama AA pada tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemerintah daerah terutama Dinas UMKM dan Koperasi sangat berperan penting dalam meningkatkan indeks ekonomi tentunya untuk Kabupaten Takalar. Bahwa dapat dilihat bagaimana UMKM bertahan pada Pandemi Covid-19 dengan melakukan pendampingan – pendampingan kepada beberapa potensi telah dikembangkan untuk membantu pemilik usaha mikro. Kemudian pada tahun 2024 Pemerintah melakukan pendampingan Koperasi dan UMKM yang anggaran atau dananya berasal dari dana alokasi khusus atau PK2UMK oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam hal ini tentunya meningkatkan perekonomian dan daya beli yang ada di Kabupaten Takalar.

Kemudian ada strategi pemberian modal menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat hal ini sejalan pada wawancara bersama Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar:

“Pada periode 2023-2024, kami telah mendorong implementasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diprakarsai oleh Gubernur. Alhamdulillah, para pelaku usaha di Kabupaten Takalar telah memberikan respons positif terhadap program KUR ini. Harapan kami, dengan adanya fasilitas KUR tersebut, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju”(Hasil wawancara bersama AA pada tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas diketahui bahwa Pemerintah Daerah mendorong dalam permodalan bagi usaha mikro kecil untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga masyarakat dapat lebih berkembang dengan kompetensi dan inovasi yang akan dijalankan.

Kemudian untuk strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat atau perekonomian,

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sudah memiliki beberapa strategi dan juga sudah berjalan tentunya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas petani dan nelayan melalui pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar:

“Untuk meningkatkan kompetensi petani dan nelayan, khususnya dalam pengembangan wirausaha baru, kami telah menyediakan beberapa program pelatihan. Program-program tersebut meliputi pelatihan pengembangan kompetensi UMKM yang difokuskan pada sektor pertanian dan nelayan. Selain itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan digitalisasi dan digital marketing yang dikhususkan bagi para petani dan nelayan untuk membantu mereka mengembangkan usaha di era digital” (Hasil wawancara bersama AA pada tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa ada upaya dalam peningkatan kompetensi dan wirausaha baru baik itu petani maupun masyarakat yang memiliki minat dalam meningkatkan kualitas wirausaha mereka. Salah satu pelatihannya adalah mengembangkan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disektor pertanian dan juga nelayan. Kemudian memberikan pelatihan terhadap digital marketing bagi masyarakat petani maupun nelayan.

Kemudian terkait ketersediaan bahan baku usaha yang ada di Kabupaten takalar itu dilihat dari ketersediaan stok yang ada di Kabupaten Takalar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar.

“Ketersediaan bahan baku usaha sangat bergantung pada stok yang ada di Kabupaten Takalar. Mayoritas pelaku usaha mikro, bukan usaha kecil, memanfaatkan bahan baku yang tersedia di wilayah Kabupaten Takalar. Khusus untuk sektor kerajinan, para pengrajin memanfaatkan bahan baku dari lingkungan alam sekitar. Sebagai contoh, untuk pembuatan kerajinan craft seperti gerabah, bahan bakunya diambil dari tanah liat yang tersedia di sekitar tempat tinggal pelaku usaha. Demikian juga dengan anyaman dan songkok guru, bahan bakunya berasal dari pohon lontar yang tumbuh di sekitar rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Kabupaten Takalar sangat bergantung pada sumber daya alam lokal” (Hasil wawancara bersama AA pada tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ketersediaan bahan baku usaha itu ditentukan dari usaha apa yang dijalankan oleh pelaku usaha artinya bagaimana usaha ini memanfaatkan ketersediaan stok yang ada di lingkungan Kabupaten Takalar. Mayoritas pelaku usaha mikro yang ada di kabupaten takalar bukan usaha kecil, yang dimana usaha mikro itu sendiri mengambil ketersediaan bahan baku yang ada di sekitar lingkungan adapun usaha mikro tersebut menjadi ciri khas kabupaten Takalar, seperti dari segi craft yakni geraba, anyaman sara lontar, songkok guru dan masih banyak lagi, untuk dari segi makanan ada bepang yang sudah sampai ke pasar global. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

“Untuk sektor *home industry*, produk kerajinan atau craft kami merupakan yang paling menonjol dan sering berpartisipasi dalam berbagai pameran budaya dan event lainnya. Alhamdulillah, produk gerabah kami telah berhasil memasuki pasar Jakarta. Bahkan, untuk produk *bepang*, kami telah mencapai tahap ekspor ke luar negeri. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi industri rumahan Kabupaten Takalar.” (Hasil wawancara bersama Ka pada tanggal 5 November 2024).



Gambar 4. 3 Dekranasda Kabupaten Takalar Berpartisipasi dalam Pameran Kriyanusa 2024 di Jakarta (28/08/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa *home industry* IKM dan juga UMKM bisa bersaing dipasar global artinya peningkatan ekonomi dibidang pasar dan juga daya beli dapat bersaing dengan kabupaten lain. Kemudian pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) berpaerisipasi dalam pameran Kriyanusa di Jakarta 2024, tujuannya adalah untuk memperkenalkan keunikan kerajinan tangan (*craft*) yang ada di Takalar seperti tas kulit dengan motif rajukan, geraba, topi, dan produk lainnya. Pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan perdagangan juga membuka kerjasama antar daerah seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

“kami ada kerjasama dengan kabupaten lain dalam hal perdagangan. Kerjasama ini dengan daerah wajo terkait pemasaran cabai di bidang pertanian, ini juga menjadi salah satu meningkatkan kualitas perekonomian kami di Kabupaten Takalar.” (Hasil wawancara bersama Ka pada tanggal 5 November 2024).

Dari kutipan wawancara di atas pemerintah daerah dengan baik menerima tawaran – tawaran untuk berkerja sama dengan antar kabupaten atau daerah bahkan sampai ke luar wilayah provinsi tentunya.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa pihak terkait dengan peningkatan indeks perekonomian atau daya beli masyarakat Kabupaten Takalar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar :

“Sebenarnya kolaborasi itu sangat penting, dan kami telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun sektor swasta. Sebagai contoh, kami sering bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi akses pasar bagi produk lokal kami. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki program CSR (*Corporate Social Responsibility*) setau saya ada dua ya di takalar termasuk program itu ada namanya Bantuan perlengkapan sekolah dari Mercure Makassar Nexa Pettarani kepada SMK YAPTA dan bantuan bibit rumput laut dari Nindya Karya kepada kelompok nelayan di Desa Laikang, di mana mereka dap at membantu membiayai pelatihan atau menyediakan fasilitas bagi pengembangan IKM.” (Hasil wawancara bersama Ka pada tanggal 5 November 2024).



Gambar 4. 4 Mercure Makassar Nexa Pettarani Salurkan CSR Pendidikan di SMK Yapta Kabupaten Takalar (Senin/21/08/2023) dan Dukung Potensi Daerah, Nindya Karya Salurkan Bantuan Bibit Rumput Laut di Takalar (Jumat/27/12/2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun sektor swasta. Salah satunya adalah memfasilitasi akses pasar bagi produk lokal dan bekerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti Bantuan perlengkapan sekolah dari Mercure Makassar Nexa Pettarani kepada SMK YAPTA dan bantuan bibit rumput laut dari Nindya Karya kepada kelompok nelayan di Desa Laikang, dimana nantinya akan menjadi pembiayaan pelatihan dan fasilitas untuk mengembangkan IKM.

3. Penilaian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar

Penilaian strategi atau evaluasi merupakan tahap terakhir dimana pencapaian suatu strategi dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menjalankan strateginya dan juga mengevaluasi penerapan strategi yang dilakukan kemudian dilakukan peninjauan ulang terhadap landasan yang digunakan dalam strategi, pengukuran kinerja dan juga pengambilan langkah kolektifnya berikut adalah strategi yang dilakukan :

Peran yang dilakukan Bappaelitbangda sebagai lintas sektoral dalam mengevaluasi atau dalam proses penilaian strategi dengan melakukan mekanisme rapat koordinasi triwulan dengan seluruh OPD yang terkait hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar :

“Kami menerapkan sistem evaluasi berkala melalui rapat koordinasi triwulanan dengan seluruh OPD terkait. Dalam evaluasi ini, kami

membahas pencapaian indikator IPM meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Setiap OPD melaporkan progres program mereka dan kendala yang dihadapi” (wawancara bersama Ari 12 September 2024).

Kemudian tantangan utama pada koordinasi lintas sektoral adalah menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar :

“Tantangan utamanya adalah menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan program-program peningkatan IPM. Kami harus cermat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bappelitbangda menghadapi kompleksitas dalam mengelola program peningkatan IPM, yang membutuhkan pendekatan strategis dalam koordinasi dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan OPD terkait dan secara aspek komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia:

a. Aspek Pendidikan

Berdasarkan dari perumusan strategi dan penerapan strategi bahwa ditemukan kinerja capaian yang didapat pada aspek pendidikan terkait strategi yang diterapkan ditemukan bahwa harapan lama sekolah dari tahun 2020 – 2024 sebesar 12,41 – 12,50 atau mencapai dengan kelas 3 SMA. Kemudian nilai yang diperoleh berdasarkan kinerja pada rata – rata lama sekolah di Kabupaten Takalar dari tahun 2020 – 2024 sebesar 7,29 – 7,73 atau setara dengan kelas 1 SMP atau tamat SD.

Kemudian evaluasi yang dilakukan dengan meningkatkan pendataan data masyarakat yang putus sekolah bersama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinas Pendidikan mengupayakan agar masyarakat yang umurnya masih bisa mengikuti pendidikan secara formal dapat dimasukkan ke sekolah pada umumnya dan ketika sudah berumur 25 tahun keatas dan sudah tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah formal maka diserahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dapat diketahui bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak seperti sekolah formal pada umumnya yang dimana waktu belajarnya termasuk flexibel artinya fokus kepada masyarakat yang sudah bekerja tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan dimasukkan kedalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan ijasa dengan memanfaatkan yayasan atau program tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar:

“Kemudian sisa dari ini, karena banyak masih umur 25 tahun itu yang banyak, jadi kan yang dibawahnya itu bisa ditanggung bisa masuk PKBM, dan bisa masuk di formal. Ini yang 25 tahun keatas yang masih ada 2.000 lebih siswa tahun depan nanti ini kita akan kembalikan ke desanya masing – masing bahwa ini wargamu sekolahkan. Jadi desa ini kemarin PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sudah berjanji setiap tahun itu desa wajib mengembalikan warganya 10 orang perdesa jadi 2.000 lebih ini kami sebarakan ke semua desa untuk disekolahkan kembali. Kami tidak mampu di dinas pendidikan jadi itu bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan tapi itu harus banyak peran dari stakeholder, dari desa, dari PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dari dukcapil nah itu yang kami lakukan.” (Hasil wawancara bersama Ms pada tanggal 8 Oktober 2024).

Sementara untuk menyukkseskan program tersebut mebutuhkan banyak peran dari stakeholder, dari Dukcapil untuk pendataan yang kemudian mereka bekerja sama dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sehingga jumlah

masyarakat yang ditemukan sebelumnya 3.727 masyarakat putus sekolah dan dalam temuan tersebut ada 2.000 lebih masyarakat diatas 25 tahun ini juga dapat berkurang tiap tahunnya yang artinya menjadi tolak ukur dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar.

b. Aspek Kesehatan

Berdasarkan Penerapan Strategi dan Penerapan strategi bahwa dapat dinilai luaran kinerja yang diperoleh Pemerintah Daerah pada aspek Kesehatan berdasarkan UHH SP 2010 diperoleh nilai 67,18 – 68,11 pada tahun 2020 – 2024 artinya harapan hidup Kabupaten Takalar berada pada rata – rata 67 – 68 tahun berdasarkan standar UNDP dan BPS berada pada tingkatan menengah keatas.

Sedangkan berdasarkan UHH LF SP 2020 diperoleh nilai 72,69 – 73,69 pada tahun 2020 – 2024 artinya harapan hidup yang diperoleh rata – rata usia 72 – 73 tahun berdasarkan standar UNDP dan BPS berada pada tingkatan tinggi.

Evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam menekan angka kematian untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dimana dinas kesehatan memiliki peran yang cukup strategis, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“upaya – upayanya yang dilakukan itu termasuk dengan pelatihan – pelatihan tenaga kesehatan meningkatkan pendidikannya, kemudian memberikan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengerti apa sebenarnya itu kesehatan. Bukan cuman tenaga kesehatan tetapi ada tenaga – tenaga kader juga yang dilatih karena tenaga kader juga merupakan ujung tombak di desa ini atau di masyarakat untuk memberikan informasi karena kita di dinas kesehatan ini khususnya tenaga kesehatan masih terbatas artinya terbatas dalam hal jumlah.” (Hasil wawancara bersama Ni pada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dengan mengadakan penyuluhan ke masyarakat ini berkaitan dengan kepememilikan layanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham dan akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan lainnya. Dinas kesehatan juga memanfaatkan tenaga – tenaga kader yang tersebar di berbagai kecamatan Polindes atau Poskesdes untuk memberikan informasi mengenai apa yang masyarakat tidak ketahui.

Selain program tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar juga melakukan inovasi dalam programnya hal ini sesuai dengan pernyataan Staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar :

“Salah satu inovasi yang kami terapkan adalah program "Gizi Seimbang Sejak Dini". Program ini mengedukasi ibu-ibu, terutama ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita, tentang pentingnya pemberian makan yang bergizi. Kami bekerja sama dengan puskesmas dan kader kesehatan untuk melakukan pemantauan gizi secara rutin melalui pemeriksaan berat badan dan tinggi badan anak serta memberikan penyuluhan tentang pola makan yang baik.” (Hasil wawancara bersama Ar pada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dinas Kesehatan Kabupaten Takalar juga melakukan penguatan pada inovasi terhadap program – program nya seperti program Gizi Seimbang Sejak Dini yang dimana program ini memberikan edukasi terhadap ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita mengenai bagaimana pemberian makan yang bergizi dan dalam program ini bekerja sama dengan puskesmas dan kader kesehatan yang ada di masyarakat untuk melakukan pemantauan gizi secara rutin dengan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan memberikan pemahaman tentang pola makan yang baik.

c. Aspek Daya Beli

Berdasarkan Perumusan Strategi dan Penerapan strategi yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Penilaian Strategi yang dicapai adalah Daya Beli/Pengeluaran Riil Per Kapita adalah sebesar 10.454 – 11.679 pada tahun 2020 – 2024 atau setara dengan Rp.10.454.000 – Rp.11.679.000 per tahun.

Kemudian melakukan evaluasi strategi yang dijalankan juga ada beragam seperti menguatkan UMKM dari segi perizinan, permodalan dan juga pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar :

“Jadi intinya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu kan ada salah satunya sektor ekonomi kemudian untuk meningkatkan ekonomi tentunya kita harus siapkan penguatan di sektor UMKM itu sendiri, tentunya untuk mrnguatkan UMKM ini harus didukung dari segi perizinan, permodalan, kemudian pemberdayaan. Nah kalau untuk di sektor perizinan itu kita sudah memfasilitasi hampir tercatat ini di bulan september sekitar sudah masuk diangka 5.000 an yang sudah memiliki perizinan usaha dan nomor induk usaha. Kemudian juga pendampingan yang sudah saya jelaskan tadi, nah ini untuk permodalan bisa juga ya, artinya kan mayoritas keluhan dari pelaku usaha UMKM ini adalah modal. Jadi kalau kita di 2023 – 2024 kita telah dorong melakukan skema KUR kredit usaha rakyat yang gaungkan oleh gubernur dan alhamdulillah kabupaten Takalar khususnya untuk pelaku usaha itu sudah menyambut baik dengan KUR itu harapannya bahwa pelaku UMKM ini bisa berkembang lagi dan alhamdulillah di 2025 itu menjadi kabar bahagia buat teman – teman pelaku UMKM bahwa pemerintah daerah itu menganggarkan untuk bantuan modal usaha free. Jadi, tidak seperti KUR ada skema pengembalian tapi kita dari pemerintah daerah itu berencana memberikan bantuan bagi pelaku UMKM, nah tentunya dengan bantuan ini pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Takalar itu tidak hanya bisa tumbuh atau misalnya seperti dikasih uang dan selesai, tetapi kita juga imbangi dengan pendampingan jadi kita kasih modal kita mendampingi usahanya dari proses produksi pengemasan branding packaging nya kemudian sampai pada proses pemasarannya baik itu diluar maupun didalam kabupatennya sendiri atau ke daerah – daerah sekitarnya.” (Hasil wawancara bersama AA pada tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan kutipan di atas bahwa evaluasi yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar bahwa penguatan UMKM terhadap perizinan dengan memfasilitasi masyarakat terhadap perizinan yang dimana saat ini tercatat sekitar 5.000 kurang lebih sudah memiliki perizinan usaha dan nomor induk usaha. Pada tahun 2023 – 2024 dari segi permodalan UMKM strategi Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan evaluasi pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil melakukan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan harapan bahwa pelaku UMKM ini bisa berkembang. Tetapi perlu diketahui bahwa skema Kredit Usaha Rakyat ini memiliki skema pengembalian artinya pemberian modal usaha harus dikembalikan dalam masa kurun waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu adapun agenda penyelesaian masalah KUR ini kedepannya adalah di tahun 2025 Pemerintah Daerah berencana memberikan bantuan modal usaha secara free yang kemudian akan dipantau oleh Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

Pemerintah daerah juga melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki strategi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terkhusus daya beli masyarakat atau perekonomian yang ada di Kabupaten Takalar, seperti memberikan pengembangan usaha kecil kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Karlinda Kepala Badan Perencanaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar :

“Salah satu strategi utama kami adalah pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Takalar. Kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku IKM, baik itu dalam hal peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, hingga pemasaran yang lebih luas. Kami juga berusaha memfasilitasi akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil melalui program-program yang bekerja sama dengan lembaga keuangan kami juga memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, kami juga memanfaatkan potensi lokal seperti produk pertanian dan perikanan untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung tetapi juga membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 November 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa strategi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, hingga pemasaran yang lebih luas. Disperindag juga memberikan fasilitas akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil melalui program – program yang bekerja sama tentunya dengan lembaga keuangan dalam hal ini juga memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian memanfaatkan potensi masyarakat lokal dengan menggunakan produk pertanian dan perikanan untuk dikembangkan menjadi nilai tambah ekonomi dan juga menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Penilaian Strategi di atas maka dapat disimpulkan beberapa evaluasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar tertuang pada Tabel Berikut:

Tabel 4. 13 Tabel Capaian dan Evaluasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar

Nilai IPM		
Komponen Pembentuk		Capaian 2024
Aspek Pendidikan	HLS	12,50 (Setara 12 tahun sekolah)
	RLS	7,73 (Setara 7 tahun sekolah)
	IP	60,49 (Sedang)
Aspek Kesehatan	UHH SP 2010	68,11 (Angka hidup 68 tahun)
	UHH SP LF 2020	73,69 (Angka hidup 69 tahun)
	IK SP 2010	74,02 (Tinggi)
	IK SP LF 2020	82,60 (Tinggi)
Aspek Daya Beli	PRPP	Rp. 11.679.000
	IPN	74,88 (Tinggi)
IPM SP 2010		69,47 (Sedang)
IPM SP 2020		72,06 (Tinggi)
Evaluasi		
Aspek Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sisa dari angka masyarakat yang ditemukan putus sekolah di rentan umur 25 tahun keatas sebanyak 2.000 kurang dan lebih yang tersisa nantinya akan dikembalikan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang dimana sudah berjanji bahwa setiap tahunnya Desa wajib mengembalikan warganya 10 orang setiap desa yang putus sekolah untuk disekolahkan kembali. 2) Penguatan terhadap tanggung jawab serta peran dari berbagai <i>stakeholder</i>, dari Desa, dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kemudian dari Dukcapil terhadap pendataan status sekolah masyarakat. 	

Evaluasi	
Aspek Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan penguatan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih memerhatikan tentang kepentingan kesehatan sebagai upaya menekan angka kematian atau hidup sehat. 2) Keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dalam hal jumlah artinya masih perlu dievaluasi.

	3) Mengembangkan inovasi pada program “Gizi Seimbang Sejak Dini” dalam hal ini memberikan edukasi terhadap ibu hamil tentang pentingnya kualitas kesehatan bayi bagi penunjang umur harapan hidup saat lahir.
Aspek Daya Beli	1) Penguatan dukungan dari segi perizinan, permodalan, dan pemberdayaan. 2) Pendampingan secara berkala terhadap UMKM dan IKM yang menggunakan Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). 3) Memiliki agenda di tahun 2025 Pemerintah Daerah menganggarkan untuk bantuan modal usaha secara <i>free</i> . Hal ini penyempurna pemberian modal berbeda dengan Skema KUR yang harus dikembalikan dalam waktu kurun waktu yang telah ditetapkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Strategi menurut (David & R, 2009), proses manajemen strategis terdiri dari tiga langkah yakni pertama perumusan strategi, penerapan strategi, kemudian Penilaian strategi. Jika dikaitkan dengan strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, proses dari ketiga manajemen strategi yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan sedang melalui ketiga tahap ini. Dengan demikian dikarenakan upaya atau strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang terkait berada pada tahap Perumusan Strategi (perencanaan), Penerapan Strategi (implementasi), dan Penilaian Strategi (evaluasi).

1. Perumusan Strategi Dalam Meningkatkan Indeks Pemnangunan Manusia di Kabupaten Takalar

Analisis perumusan strategi oleh Bappelitbangda Kabupaten Takalar menunjukkan pendekatan sistematis dalam pembangunan daerah. Badan ini berperan sebagai koordinator lintas sektoral yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan melalui proses perencanaan yang terstruktur.

Proses perumusan strategi diawali dengan memetakan permasalahan dalam tiga indikator utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan penilaian komprehensif yang memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang secara holistik. Melalui rapat koordinasi, Bappelitbangda memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan untuk menganalisis hasil pemetaan dan merumuskan langkah-langkah strategis.

Tahapan selanjutnya meliputi pengembangan skenario dan pemantapan strategi yang mengarah pada fokus intervensi. Proses ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berbasis data dalam perencanaan pembangunan daerah. Peran Bappelitbangda sebagai koordinator lintas sektoral memastikan terjadinya sinergi antar sektor dalam pelaksanaan program pembangunan.

Analisis yang diterapkan oleh Bappelitbangda mencerminkan pendekatan strategi perencanaan yang komprehensif, dimulai dari mengidentifikasi masalah hingga perumusan solusi konkret. Proses ini memungkinkan strategi pengembangan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu, sambil mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan tantangan implementasi yang mungkin dihadapi.

Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis bukti. Proses perumusan strategi yang dilakukan juga memperlihatkan upaya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

a. Aspek Pendidikan

Tinggi atau rendahnya pembangunan manusia yang ada di wilayah ataupun daerah diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan akumulasi aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan kemampuan perekonomian atau daya beli yang ada di suatu daerah atau wilayah.

Diketahui dari aspek pendidikan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Takalar sangat tinggi berada pada angka 3.700 masyarakat putus sekolah ini berdasarkan angka umur 12 – 25 tahun keatas sedangkan dari akumulasi tersebut ditemukan bahwa umur 25 tahun keatas yang putus sekolah berjumlah 2.000 masyarakat yang ditemukan. Berdasarkan dari hal tersebut Kabupaten Takalar masyarakatnya dari tahun 2020 – 2024 itu rata – rata lama sekolahnya adalah 7 tahun atau setara dengan lulus Sekolah Dasar (SD) atau kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Secara nasional program program wajib belajar itu adalah 9 tahun itu berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1994, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2015 tepatnya juni bahwa program wajib belajar

masyarakat Indonesia adalah 12 tahun yang tercantum pada nawacita Jokowi (Tri Sulistiowati, 2024). Berdasarkan hasil sumber tersebut standar wajib belajar Indonesia Kabupaten Takalar masih berada dibawah dari angka yang ditetapkan sehingganya hal tersebutlah yang berdampak pada nilai Pembangunan Manusia.

Kendala lain yang dihadapi Kabupaten Takalar dalam menghadapi angka putus sekolah dengan adanya program – program yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengurangi angka tersebut. Kendala yang muncul adalah justru dari internal masyarakat itu sendiri yakni usia yang sudah tidak mempunyai untuk disekolahkan secara formal, pola pikir serta budaya yang tertanam pada masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar bahwa sekolah formal tidak memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat,

Artinya prioritas dalam menyekolahkan atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak ada sebab pengaruh budaya masyarakat ketika mendapatkan penghasilan dan juga pekerjaan yang membuat mereka terbuai didalamnya tanpa harus menempuh jenjang pendidikan. Maka dari itu masyarakat yang berumur diatas 25 tahun keatas yang putus sekolah tidak semua mau mengikuti program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Kemudian terhadap kendala pemetaan data berdasarkan status pendidikan yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tidak sejalan dikarenakan masyarakat tidak memperbaharui datanya sehingga Dinas Pendidikan kesulitan untuk menemukan masyarakat putus sekolah dan target yang akan dieksekusi untuk menjalankan program menekan angka putus sekolah.

Berdasarkan analisis korelasi dengan konsep penelitian strategi David (2009), situasi pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan perlunya evaluasi dan penelitian strategi yang komprehensif. Teori David pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal dalam mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi.

Tingginya angka putus sekolah (3.700 orang) dan rata-rata lama sekolah yang hanya 7 tahun menunjukkan adanya kelemahan. Kondisi ini bertentangan dengan standar nasional wajib belajar 12 tahun, menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kendala internal seperti pola pikir masyarakat yang menganggap pendidikan formal tidak berdampak pada kondisi ekonomi yang mencerminkan ancaman dalam kerangka analisis David. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang tidak hanya fokus pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga transformasi budaya dan pola pikir masyarakat.

Kesulitan dalam memetakan data karena ketidakakuratan informasi dalam Kartu Keluarga merupakan kelemahan dalam sistem informasi yang menurut David 2009 penting untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini menghambat efektivitas program-program yang telah dirancang pemerintah.

Keseluruhan situasi ini menunjukkan pentingnya Perumusan Strategi yang mengintegrasikan aspek teknis (penyediaan akses pendidikan) dengan aspek sosial-budaya (perubahan pola pikir masyarakat), sesuai dengan kerangka komprehensif David dalam strategi manajemen. Strategi ini harus mempertimbangkan baik faktor

internal (kapasitas organisasi, sistem informasi) maupun eksternal (budaya masyarakat, kebijakan nasional) untuk mencapai efektivitas yang optimal.

b. Aspek Kesehatan

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia selanjutnya berdasarkan indikator pembentuknya menurut Badan Pusat Statistika (BPS) yakni pada aspek kesehatan. Adanya akulturasi yang muncul mengakibatkan berbagai pemahaman terhadap masyarakat dalam melakukan pengobatan dan juga perkembangan kesehatan yang mana masyarakat masih paham dengan pengobatan kampung (dukun). Akibatnya, setiap kali ada keluarga yang mengalami masalah kesehatan, warga Kabupaten Takalar secara otomatis mencari pengobatan alternatif (dukun) ketimbang melakukan tindakan medis. Kemudian dalam penggunaan obat – obatan tanpa resep dan pantauan tenaga medis dalam memberikan dosis juga masih dilakukan masyarakat sehingga perlu adanya pemberian pemahaman.

Masalah lainnya yang muncul adalah akses air bersih yang belum merata orang yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil lebih mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses udara bersih. Cacat infrastruktur, seperti jaringan pipa air bersih atau sumur bor yang terkontaminasi limbah sawah, seperti sumur gali atau air hujan, yang sering kali gagal memenuhi standar keselamatan. Di beberapa daerah, kualitas air yang tersedia juga menjadi masalah. air dari sumur atau sumber air terus-menerus tercemar oleh faktor domestik atau lingkungan, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bahwa dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan akses *clean water and sanitation* (Air

bersih dan Sanitasi) dalam hal ini Kabupaten Takalar akses air bersihnya belum merata.

Masyarakat umum semakin kekurangan akses terhadap teknologi pemurnian udara yang canggih. Ini dikarenakan Kabupaten Takalar, terletak di daerah pesisir, rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan atau cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi ketersediaan air. Hal ini dapat memperburuk kondisi bagi masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air bersih. Maka dari itu untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Daerah Melakukan penguatan infrastruktur kesehatan sebagai upaya pencegahan dan juga pemberian solusi terhadap kondisi air bersih yang tidak merata.

Berdasarkan analisis korelasi dengan konsep perumusan strategi David (2009), situasi kesehatan di Kabupaten Takalar menunjukkan perlunya pendekatan strategis yang komprehensif. Berdasarkan teori tersebut tentang perlu menekankan pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal dalam perumusan strategi yang efektif.

Fenomena akulturasi dalam praktik kesehatan, di mana masyarakat masih mengandalkan pengobatan tradisional (dukun), mencerminkan tantangan cultural environment yang diidentifikasi dalam kerangka analisis eksternal David. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya dalam implementasi program kesehatan.

Permasalahan akses air bersih yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam analisis David. Infrastruktur yang tidak memadai dan kontaminasi sumber udara oleh limbah

pertanian menunjukkan kesenjangan dalam pemindaian lingkungan yang perlu diatasi melalui penyusunan strategi yang tepat.

Upaya pemerintah dalam penguatan infrastruktur kesehatan menunjukkan Perumusan Strategi berdasarkan David (2009), namun tetap memerlukan integrasi dengan aspek sosial-budaya masyarakat. Keseluruhan situasi ini menunjukkan pentingnya kepentingan strategi yang mempertimbangkan baik faktor teknis maupun sosial-budaya, sesuai dengan kerangka komprehensif David dalam strategi manajemen.

c. Aspek Daya Beli

Dalam mengukur pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik yang terakhir adalah kemampuan daya beli atau perekonomian dalam suatu daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Takalar berdasarkan standar BPS masih terbelah rendah, dikarenakan kurangnya inovasi dan tenaga kerja dalam mendampingi IKM dan UMKM tentunya masih dalam tahap proses pengembangan yang masih berjalan.

Hal itu kemudian tercermin pada harga produk yang dihasilkan masyarakat Takalar. Tetapi dalam hal ini inovasi yang dikembangkan juga sudah bervariasi nilai jual produk yang sudah diolah dari bahan baku mentah yang ada tergantung dari usaha yang dijalankan UMKM dan IKM menjadi kreatifitas sehingga ketika dalam mengolah produk tersebut menjadi sesuatu yang baru maka nilai jualnya akan berbanding lurus dengan kualitas produknya.

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas di butuhkan *empowerment* sebagaimana menurut (Aldiansyah Akbar et al., 2023) pembangunan perekonomian

itu berkaitan dengan pemberdayaan seperti yang dijabarkan Zubaidi (2022), potensi daerah adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Potensi daerah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut. Dengan memberdayakan potensi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Efek domino lainnya adalah karena harga jual yang ada di kabupaten Takalar terbilang rendah mengakibatkan kontribusi PDRB dari sektor – sektor pertanian maupun perdagangan ikut rendah. Berdasarkan komposisinya bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Takalar 70% hingga 80% bekerja di sektor pertanian (meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan), sementara kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut sebesar 50,75 % , sementara masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan kontribusi PDRB nya adalah 12,44 % sisanya adalah yang bekerja di non pertanian dan non perdagangan (PNS, ibu rumah tangga, dan lain-lain). Tetapi karena kontribusi PDRB di sektor pertanian terbilang cukup tinggi inilah yang menjadikan angka indeks pengeluaran Kabupaten Takalar berada di angka tinggi yakni sebesar 74,88 di tahun 2024.

Berdasarkan analisis korelasi dengan konsep perumusan strategi David (2009), kondisi ekonomi Kabupaten Takalar menunjukkan perlunya formulasi strategi yang komprehensif. David menekankan pentingnya analisis lingkungan

internal dan eksternal dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan ekonomi daerah.

Rendahnya daya beli masyarakat dan kurangnya inovasi dalam UMKM/IKM merupakan kelemahan yang ada pada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan kapasitas dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Potensi daerah yang meliputi sumber daya alam, manusia, dan kearifan lokal merupakan *strength* dalam kerangka analisis David. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) yang diterapkan mencerminkan upaya mengoptimalkan sumber daya internal untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Dominasi sektor pertanian (70-80% tenaga kerja) dengan kontribusi PDRB 50,75% menunjukkan *opportunity* dalam analisis eksternal David. Namun, rendahnya harga jual produk dan kontribusi sektor perdagangan (12,44%) mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi dan pengembangan nilai tambah.

2. Penerapan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar

Berdasarkan pada perumusan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan langkah Penerapan strategi sebagai berikut:

a. Aspek Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Takalar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis. Implementasi program ini dilakukan melalui pendekatan sistematis yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kerjasama dengan Kementerian Desa dan UNICEF.

Salah satu program unggulan yang diimplementasikan adalah Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Program ini melibatkan pelatihan operator sekolah dan petugas desa, dengan setiap desa memiliki empat petugas pendata terlatih. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pendataan yang akurat dan terstruktur sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dalam mengatasi masalah putus sekolah, pemerintah daerah mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menawarkan program Paket A, B, dan C. Program ini dirancang dengan sistem pembelajaran yang fleksibel, memungkinkan pertemuan bulanan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki kendala waktu atau enggan mengikuti pendidikan formal. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah PKBM dari 7 unit menjadi 48 unit sejak tahun 2018 melalui program “1 Desa 1 PKBM”.

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 3.727 warga yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan. Pemerintah merespon hal ini dengan strategi penanganan yang berbeda berdasarkan usia: peserta didik usia sekolah diarahkan ke pendidikan formal, sementara mereka yang berusia lebih tua difasilitasi melalui PKBM. Integrasi data peserta didik ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memberikan legitimasi formal terhadap pendidikan yang diperoleh.

Program “Desa Peduli Pendidikan” juga diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan setara dengan sekolah pada umumnya.

Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan hingga ke tingkat desa. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah daerah untuk meningkatkan harapan lama sekolah hingga jenjang Diploma 1, meskipun saat ini rata-rata lama sekolah masih setara dengan kelas 1 SMP.

Khusus untuk warga berusia di atas 25 tahun yang berjumlah lebih dari 2.000 orang, pemerintah daerah berencana mengembalikan data mereka ke desa masing-masing untuk difasilitasi pendidikannya di tingkat desa. Hal ini menunjukkan pendekatan desentralisasi dalam penanganan masalah pendidikan, memberikan tanggung jawab dan peran lebih besar kepada pemerintah desa.

Kesuksesan program-program ini tidak terlepas dari pendekatan sistematis yang dimulai dari pelatihan, pendataan, validasi data, hingga implementasi program. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Takalar melalui peningkatan partisipasi sekolah dan pemerataan akses pendidikan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun, dengan berbagai program yang telah diimplementasikan dan komitmen kuat pemerintah daerah, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan arah yang positif dalam mencapai target pembangunan manusia yang lebih baik.

Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya tidak ada pengaruh pada perubahan perekonomian masyarakat tentu enggan untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam program tersebut. Proses untuk mengubah pola pikir tersebut memang harus dilakukan menurut (Suryono & Agus, 2010), tujuan pembangunan

sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat struktur sosial.

Maksudnya adalah masyarakat meningkatkan kualitas kesejahteraan individu dengan memperbaiki pola pikir untuk lebih maju yang mana semuanya saling berkaitan dengan memberikan dapat meningkatkan kualitas hidup kemudian ketika kualitas hidup baik maka akan memperkuat struktur sosial sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang harus ditempuh masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan juga apabila masyarakat ingin memperbaiki struktur sosial mereka dalam hal tersebut perekonomian juga membaik tentunya.

Berdasarkan analisis korelasi dengan konsep strategi David (2009), implementasi strategi pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan penerapan yang komprehensif dan sistematis. Pendekatan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen strategis David yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan dan implementasi.

Program SIPBM mencerminkan konsep pemindaian lingkungan David, di mana pengumpulan dan analisis data lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar pengambilan keputusan strategi. Pelatihan operator sekolah dan petugas desa menunjukkan penerapan strategi berdasarkan teori David (2009) yang menekankan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pengembangan PKBM dengan program Paket A, B, dan C mengimplementasikan konsep strategi diferensiasi David, di mana organisasi menciptakan nilai unik melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan

spesifik target pasar. Peningkatan jumlah PKBM dari 7 menjadi 48 unit mencerminkan strategi pertumbuhan yang efektif sesuai dengan pendekatan David (2009).

Program “Desa Peduli Pendidikan” dan pendekatan desentralisasi dalam penanganan pendidikan menerapkan konsep struktur organisasi David yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang mendukung implementasi strategi. Integrasi data ke dalam Dapodik menunjukkan penerapan sistem informasi manajemen yang efektif sesuai dengan prinsip David tentang pentingnya sistem kontrol.

Upaya mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan sejalan dengan konsep manajemen perubahan strategis David, yang menekan pentingnya pengelolaan perubahan budaya organisasi dan pemangku kepentingan. Fokus pada peningkatan IPM melalui partisipasi sekolah menunjukkan penerapan pengendalian strategis David dalam mengukur efektivitas strategi.

b. Aspek Kesehatan

Kemudian berdasarkan dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai akses masyarakat dalam hal kesehatan sudah cukup memadai. Setidaknya ada 17 Puskesmas, 56 Pustu, dan 47 Polindes yang merupakan jejaring dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan. Ketersediaan tersebut juga menjadi akses kesehatan terdekat masyarakat.

Terkait pelayanan, akses kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Takalar sangat baik miskin maupun kaya sangat mudah untuk mendapatkan akses. Sebab

kesehatan merupakan aspek krusial pembangunan sosial yang harus diperhatikan oleh semua orang. Hal ini sejalan dengan sistem pembangunan sosial yang dikenal sebagai konsumsi dan distribusi, memenuhi kebutuhan dasar (Suryono & Agus, 2010). Hal ini sejalan dikarenakan Kabupaten Takalar memenuhi hal tersebut dengan memudahkan akses seperti pemberian kartu kesehatan (BPJS) bagi masyarakat miskin, akses layanan berbasis online, kemudian ada PSC911 yang bertugas sebagai layanan *home care*.

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar melakukan strategi penguatan pada program yang telah berjalan seperti Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, serta penanganan penyakit menular maupun tidak menular, kemudian memberantas permasalahan stunting atau gizi buruk anak yang dijalankan rutin bersama dengan BPKBN. Kemudian dinas Kesehatan juga memberikan program pencegahan yang berkaitan dengan pola hidup sehat seperti kampanye gizi seimbang, program DASHAT, penyuluhan kesehatan secara rutin, memberikan edukasi terhadap penyakit menular, serta menghindari perilaku yang beresiko.

Dengan melakukan kampanye gizi seimbang, kemudian memberikan bantuan makanan pokok penunjang gizi anak yang kemudian akan selalu dipantau oleh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar. Kemudian memberikan program berkaitan dengan pola hidup sehat seperti, kampanye gizi seimbang, pencegahan merokok, peningkatan aktifitas fisik dan mengadakan penyuluhan rutin di desa – desa edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat, menjaga kebersihan, serta menghindari perilaku yang berisiko tinggi. Salah satu program unggulan

lainnya adalah mempromosikan hidup sehat dengan tujuan mencegah penyakit tidak menular dan menular melalui perubahan cara hidup masyarakat umum.

Hal ini dimanfaatkan Dinas Kesehatan dengan menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terkhusus Kader kesehatan yang tersebar di berbagai kecamatan pada poskesdes dan pustu. Tentunya mereka juga memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan masyarakat. Indikator-indikator ini merupakan indikator yang paling efektif untuk intervensi dan pemantauan pemerintah.

Berdasarkan analisis korelasi dengan konsep strategi David (2009), penerapan strategi kesehatan di Kabupaten Takalar menunjukkan implementasi yang komprehensif. David menekankan bahwa strategi yang efektif harus memiliki integrasi antara perencanaan dan implementasi, yang tercermin dalam pendekatan Dinas Kesehatan Takalar.

Infrastruktur kesehatan yang terdiri dari 17 Puskesmas, 56 Pustu, dan 47 Polindes menunjukkan penerapan pandangan berbasis sumber daya yang dikemukakan David, di mana keunggulan kompetitif dibangun melalui pengembangan dan optimalisasi sumber daya internal. Distribusi fasilitas kesehatan ini mencerminkan strategi penetrasi pasar yang merata, sesuai dengan konsep strategi pertumbuhan David.

Sistem kesehatan yang inklusif, termasuk BPJS untuk masyarakat miskin dan PSC911, mengimplementasikan konsep rantai nilai David yang menekankan pentingnya pelayanan menciptakan nilai tambah di setiap tahap pelayanan. Integrasi layanan berbasis online juga menunjukkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sesuai dengan prinsip pemindaian lingkungan David.

Program-program seperti KIA, imunisasi, dan penanggulangan stunting mencerminkan strategi intensif David melalui pengembangan produk dan pasar. Pendekatan pencegahan melalui kampanye gizi seimbang dan program DASHAT menerapkan konsep keunggulan diferensial David, di mana organisasi menciptakan keunggulan melalui layanan inovasi.

Pengembangan SDM melalui pelatihan tenaga kesehatan dan pemberdayaan kader kesehatan mengimplementasikan konsep *capacity building*. Sistem pemantauan melalui indikator AHH dan pemantauan rutin oleh kader kesehatan menerapkan konsep pengendalian strategis David yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja.

c. Aspek Daya Beli

Kemampuan daya beli suatu masyarakat merupakan salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial di suatu daerah tertentu dalam hal ini perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang notabene penduduknya merupakan Petani. Mencakup hal tersebut Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan strategi mengembangkan potensi di sektor pertanian dengan memberikan pelatihan peningkatan kompetensi nelayan dan petani maupun wirausaha baru. Kemudian memberikan pelatihan digitalisasi dari segi digital marketing sehingga masyarakat dapat memahami tren dan juga perkembangan pasar yang akan menjadi acuan pengembangan lanjutan tentunya. Kemudian pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) berpaerisipasi dalam pameran Kriyanusa di Jakarta 2024, tujuannya

adalah untuk memperkenalkan keunikan kerajinan tangan (*craft*) yang ada di Takalar seperti tas kulit dengan motif rajukan, geraba, topi, dan produk lainnya. Hal tersebut guna untuk memperbaiki daya beli masyarakat kemudian pemanfaatan potensi akan teratasi.

Berdasarkan teori Penerapan Strategi David (2009), implementasi strategi di Kabupaten Takalar menunjukkan eksekusi yang sistematis dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat. Penerapan strategi ini tercermin dalam berbagai program dan inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui berbagai dinas terkait.

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan strategi pengembangan potensi sektor pertanian melalui pelatihan peningkatan kompetensi nelayan, petani, dan wirausaha baru. Sesuai dengan konsep David tentang pengembangan kemampuan SDM, dinas Koperasi dan UMKM ini juga mengimplementasikan pelatihan digitalisasi dan pemasaran digital untuk adaptasi terhadap perkembangan pasar modern.

Program PK2UMK (Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mencerminkan penerapan strategi komprehensif yang selaras dengan teori David tentang alokasi sumber daya. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, layanan hukum, dan evaluasi berkala, menunjukkan implementasi yang terstruktur dan terukur.

Strategi fasilitasi akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggambarkan koordinasi lintas sektor yang ditekankan dalam teori

David. Pendekatan ini diperkuat dengan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penggunaan modal.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan implementasi strategi yang fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Hal ini sejalan dengan konsep David tentang pentingnya pengembangan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi.

Pembangunan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pusat, dan sektor swasta, mencerminkan implementasi strategi kolaboratif yang ditekankan David. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan seperti Mercure Makassar Nexa Pettarani dan Nindya Karya menunjukkan efektivitas dalam membangun kemitraan strategis untuk pengembangan masyarakat.

Penerapan strategi ini menunjukkan keselarasan dengan teori David dalam hal pengembangan kapasitas organisasi, alokasi sumber daya yang efektif, dan pembangunan jejaring kerjasama yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Takalar.

3. Penilaian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar

Penilaian strategi atau evaluasi merupakan tahap terakhir dimana pencapaian suatu strategi dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menjalankan strateginya dan juga mengevaluasi penerapan strategi yang dilakukan kemudian dilakukan peninjauan ulang terhadap landasan yang digunakan dalam

strategi, pengukuran kinerja dan juga pengambilan langkah kolektifnya berikut adalah yang dilakukan :

a. Aspek Pendidikan

Berdasarkan teori penilaian strategi David (2009), evaluasi kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan implementasi yang sistematis dan terukur. Pemerintah daerah telah menerapkan elemen-elemen kunci penilaian strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Dalam aspek pengukuran kinerja, pemerintah menggunakan indikator kuantitatif yang jelas sesuai dengan konsep David, yaitu harapan lama sekolah (12,41-12,50 tahun atau setara kelas 3 SMA) dan rata-rata lama sekolah (7,29-7,73 tahun atau setara kelas 1 SMP). Penggunaan metrik terukur ini memungkinkan evaluasi objektif terhadap pencapaian strategi pendidikan.

Tindakan korektif yang diimplementasikan, sesuai dengan teori David, mencakup beberapa program strategis. Ini termasuk penguatan program sekolah gratis, bantuan untuk masyarakat miskin, dan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan. Program-program ini mencerminkan respons adaptif terhadap tantangan yang teridentifikasi dalam proses evaluasi.

Inovasi kebijakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menunjukkan penerapan konsep David tentang penyesuaian strategi berdasarkan kebutuhan. Program ini menawarkan fleksibilitas waktu belajar untuk mengakomodasi masyarakat yang sudah bekerja, mendemonstrasikan adaptabilitas dalam implementasi strategi.

Sistem monitoring yang melibatkan kolaborasi multi-stakeholder (Dukcapil dan PMD) dalam pendataan dan pengurangan angka putus sekolah (dari 3.727 menjadi pengurangan signifikan pada kelompok usia di atas 25 tahun) mencerminkan elemen pengawasan berkelanjutan yang ditekankan dalam teori David. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan *tracking progress* yang efektif dan penyesuaian strategi yang tepat waktu.

Keseluruhan implementasi strategi pendidikan di Kabupaten Takalar menunjukkan keselarasan dengan konsep penilaian strategi David, dimana terdapat integrasi antara pengukuran kinerja yang jelas, evaluasi berkelanjutan, dan tindakan korektif yang responsif. Pendekatan ini telah menghasilkan peningkatan bertahap dalam indikator pendidikan dan memberikan landasan kuat untuk perbaikan berkelanjutan dalam Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut.

b. Aspek Kesehatan

Menurut David (2009), penilaian strategi merupakan komponen kritis dalam manajemen strategis yang melibatkan evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks data yang disajikan, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menerapkan penilaian strategi yang komprehensif dalam sektor kesehatan.

Penilaian kinerja kuantitatif terlihat dari pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang diukur melalui dua pendekatan. Berdasarkan SP 2010, UHH mencapai 67,18-68,11 tahun (2020-2024), menunjukkan tingkat menengah ke atas. Sedangkan menurut SP 2020, UHH meningkat menjadi 72,69-73,69 tahun, mencapai tingkat tinggi berdasarkan standar UNDP dan BPS. Penggunaan indikator

terukur ini sejalan dengan konsep David tentang pentingnya kriteria evaluasi yang jelas.

Dalam aspek infrastruktur kesehatan, penilaian strategi mencakup evaluasi distribusi dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Sesuai dengan teori David tentang pengukuran kinerja komprehensif, pemerintah melakukan pemetaan fasilitas kesehatan yang menunjukkan ketersediaan Puskesmas di setiap kecamatan, serta empat rumah sakit (tiga RSUD dan satu RS Khusus) yang memenuhi standar Permenkumham No 22 Tahun 2021.

Pemerintah daerah juga menerapkan konsep tindakan korektif David melalui berbagai program peningkatan kualitas layanan. Ini termasuk pelatihan tenaga kesehatan, penyuluhan masyarakat, dan pemanfaatan kader kesehatan di tingkat Polindes/Poskesdes. Program inovatif seperti "Gizi Seimbang Sejak Dini" mencerminkan implementasi tindakan korektif yang berfokus pada pencegahan dan edukasi.

Sistem monitoring berkelanjutan yang melibatkan pemantauan gizi rutin dan evaluasi layanan kesehatan mencerminkan elemen kunci dalam teori penilaian strategi David. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi area perbaikan dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip evaluasi strategis yang dikemukakan David.

Keseluruhan implementasi penilaian strategi di sektor kesehatan Kabupaten Takalar menunjukkan keselarasan dengan teori David, di mana terdapat pengukuran kinerja yang jelas, evaluasi berkelanjutan, dan tindakan korektif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Aspek Daya Beli

Menurut David (2009), penilaian strategi merupakan tahap final dalam proses manajemen strategis yang mencakup pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan korektif. Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menerapkan proses penilaian strategi yang sejalan dengan konsep David dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan target yang terukur untuk daya beli masyarakat, yaitu pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 10.454.000 hingga Rp 11.679.000 per tahun untuk periode 2020-2024. Penetapan target kuantitatif ini sesuai dengan prinsip David yang menekankan pentingnya standar pengukuran kinerja yang jelas dalam penilaian strategi.

Dalam implementasinya, pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan, khususnya dalam penguatan UMKM. Hal ini tercermin dari pencapaian konkret berupa fasilitasi perizinan yang telah mencapai 5.000 pelaku usaha yang memiliki perizinan usaha dan nomor induk usaha. Pencapaian ini menunjukkan adanya pengukuran kinerja yang jelas sebagaimana ditekankan dalam teori David.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menunjukkan kemampuan dalam melakukan tindakan korektif sebagaimana direkomendasikan David, yang terlihat dari evolusi strategi permodalan. Dimulai dengan implementasi skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2023-2024, kemudian setelah mengevaluasi efektivitasnya, pemerintah merencanakan transformasi ke bantuan modal tanpa

pengembalian di tahun 2025. Perubahan kebijakan ini mencerminkan proses evaluasi dan penyesuaian strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan monitoring berkelanjutan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan bantuan modal usaha juga sejalan dengan konsep David tentang pentingnya pengawasan berkelanjutan dalam penilaian strategi. Peningkatan kompetensi dalam aspek permodalan yang teridentifikasi menunjukkan bahwa proses penilaian strategi telah berhasil mengidentifikasi area-area perbaikan dan pengembangan sebagaimana digariskan dalam teori David.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang terkait berada pada tahap Perumusan Strategi, Penerapan Strategi, dan Penilaian Strategi.

1. Pada Perumusan strategi ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar merumuskan strategi berdasarkan isu internal yang ada kemudian berdasarkan peran serta visi, ditemukan perumusan strategi pemberantasan putus sekolah diumur 25 tahun keatas, pemberantasan putus sekolah melalui pemberian fasilitas fromal bagi usia sekolah, dan penguatan pendataan pada status pendidikan di KK, kemudian secara kesehatan penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan pelatihan kader kesehatan, penguatan akses kesehatan, dan pemberian program kesehatan. Lalu pada daya beli merumuskan strategi penguatan partisipasi masyarakat terhadap aksesibilitas ekonomi dan nilai pertukarann atau transaksi, kemudian penguatan kontribusi PDRB pada Petani dan Nelayan.
2. Pada penerapan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan, pemberian pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) bagi operator sekolah dan desa, pemberian program kejar Paket bekerja sama dengan PKBM ini pada aspek pendidikan, kemudian pada aspek kesehatan memberikan fasilitas infrastruktur kesehatan yang

memadai, mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat miskin, menggunakan akses kesehatan berbasis online dari segi pendaftaran, pelayanan kesehatan PSC911 yang memberikan pelayanan dari rumah (*home care*) dan penguatan program yang sudah ada untuk menekan angka kematian pemernatasan stunting dengan program DASHAT. Kemudian pada daya beli melakukan pendampingan kompetensi koperasi dan UMKM, peningkatan kompetensi wirausaha disektor petani dan nelayan melalui *digital marketing*, pemberian permodalan menggunakan skema KUR, penguatan *home industry*, kerja sama antar daerah dan pemerintah pusat terhadap akses perdagangan produk lokal dan hasil pertanian, kemudian bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki program *corporate social responentibility*.

3. Berdasarkan perumusan dan penerapan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar penilaian strategi yang dicapai berdasarkan program dan capaian kinerja yang kemudian di evaluasi adalah peningkatan nilai indeks pembangunan manusia dari segi kesehatan dan penguatan inovasi yang ada, pemberian modal usaha gratis sebagai bentuk evaluasi dari skema KUR serta penguatan pendampingan usaha atau UMKM.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Masyarakat umum yang produktif namun belum memiliki pekerjaan dan telah mengikuti pelatihan kemudian diberangkatkan ke daerah lain

untuk mengikuti program kerja sama sebagai bentuk kerja sama antardaerah.

2. Melalui Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Takalar harus mengembangkan program kesehatan yang inovatif dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
3. Pemberian pelatihan dan ketrampilan bagi penduduk produktif yang tidak bekerja, serta pemberian kemudahan perizinan usaha dan pemfasilitasan usaha bagi industri rumah tangga, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat Kabupaten Takalar dalam mencari lapangan pekerjaan.
4. Pada aspek kesehatan dengan memanfaatkan Kader Kesehatan yang ada diberbagai kecamatan dan desa-desa, memberikan penguatan pendampingan sosialisasi terkait program kesehatan kepada masyarakat luas setelah mengurangi jumlah anggaran minimum yang tersedia untuk program kesehatan.
5. Pada pendataan aspek Pendidikan perlu penguatan digitalisasi pemerintah terkhusus dukcapil dalam mengupdate data pendidikan masyarakat. Alangkah lebih baiknya adalah dengan memberikan akses terhadap masyarakat dalam memperbaharui datanya sendiri menggunakan digitalisasi yang disediakan agar data yang diterima konkret serta valid. Dalam hal itu pula perlu pendampingan penyuluhan yang mendalam terhadap penggunaannya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel, dan Jurnal

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021a). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 2654–8747.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021b). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Albashita, P. (2022). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pengembangan Umkm Di Kabupaten Pringsewu (Studi Di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)*.
- Aldiansyah Akbar, R., Fauzan, M., Asy, A., Arsyad, Hary J., & Barki, K. (2023). Implementation Of Community Empowerment Approach To Improve The Quality Of Community Life Through Regional Potential-Based Economic Development Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal Of Sciencetech Research And Development*, 5(1). [Http://Idm.Or.Id/JSCR](http://Idm.Or.Id/JSCR)
- Amrullah, Rizal Halim, M., & Syarifuddin. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Berpengaruh Pada Kantor Badan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten Takalar. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 431–441.
- Ashari, U. R. (2018). *Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia Di Kabupaten Sampang*.
- Bappeda Kabupaten Tanjung. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Bps Publikasi Takalar. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2022*.
- Budi Aryo, W. (2020). *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Bungin, & Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Cahyadi M, P. (2020). *Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Jawa Timur Putra Cahyadi M*. Www.Bps.Go.Id
- Creswell, & W, J. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar. .
- David, R, Freed, & David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. .

- David, & R, F. (2009). *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep* (David & F. R, Eds.).
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Haritani, H., Yunitasari, D., & Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70. <https://doi.org/10.22146/jkn.83425>
- Hasanah, N., & Imron, M. (2022). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Dalam Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Tahun 2020. *Journal Of Governance Innovation*, 4(2), 116–129. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1627>
- Isa Pratowo, N. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.
- Jember, A., & Cahyo Diartho, H. (2018). *Strategi Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Situbondo*.
- Kholik, S. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Vol. 6, Issue 1). Online. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Mohamad Yamin Latuconsina, Z. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan Dan Regresi Panel Analysis On Factors That Influence The Human Development Index Of Malang Regency Based On Regional Approach And Panel Regression. *Journal Of Regional And Rural Development Planning Juni*, 1(2), 202–216.
- Nurlina, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2023). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>
- Panggabean, F. Y., Dalimunthe, M. B., Ramli, R., Magdalena, L., & Lingga, R. D. (2023). Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 66–76. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4184>
- Septiani, D. (2019). *Determinasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017*.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 3(2), 97–112.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suriadi, M. (2019). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Wajo Skripsi*.

- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. (A. Suryono, Ed.). Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Suryono, & Agus. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Taufan Ashshiddiqi, M., Firmansyah, I., Syifa Ahyani, K., Febriyuni Eka Putri, L., & Fajar Maulana, M. (2021). *Strategi Program Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Desa Pakuaon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*. 2(4).
- Tjokroamidjojo, & Bintoro. (1989). *Perencanaan Pembangunan*. PT Midas Surya Grafindo.
- Tri Sulistiowati. (2024). *Wajib Belajar 13 Tahun Mulai PAUD-SMA, Disiapkan Tahun 2025*. KONTAN.CO.ID - JAKARTA.
- Ummah, S. (2024). Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode Tahun 2020-2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 41.

Sumber Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan 2020 – 2024.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia mereka sendiri.
- Undang – Undang Nomor 23 Pasal 260 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Manusia.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Data

- Badan Pusat Statistika Kabupaten Takalar
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar 2022
- Takalar Dalam Angka 2024
- Rekap Data UKM yang sudah memiliki NIB Tahun 2024
- Rekap Data Usaha Mikro Kecil Kabupaten Takalar
- Data Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut skema dan penyalur di wilayah Kabupaten Takalar

LAMP IRAN



LAMPIRAN 1

Surat Izin Meneliti (PTSP Provinsi SulSel)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 23437/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4912/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 05 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH. FAUZI RISA
Nomor Pokok	: 105611121320
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI PEMERINTAH DAERAH) DI KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 September s/d 09 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Takalar)

No. SERI 327

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Syech Yusuf No. 16 Kab. Takalar

Email: dpnptsptakalar@gmail.com website: www.dpnptsptakalar.kab.go.id

Takalar, 11 September 2024

Nomor : 327/IP-DPMPTSP/X/2024 Yth. Kepada
Lamp. : - Terlampir
Perihal : Izin Penelitian Di Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel, Nomor: 23437/S.01/PTSP/2024, Tanggal 06 September 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor:070/334/BKBP/IX/2024, tanggal 11 September 2024, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MUH. FAUZI RISA
 Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 01 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Dusun Durian Kunyi Desa/Kel. Buntur Torpedo
 Kec. Sabba Kab. Luwu Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam rangka *Penyusunan Skripsi* dengan judul :

"STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI PEMERINTAH DAERAH) DI KABUPATEN TAKALAR ".

Yang akan dilaksanakan : 09 September s/d 09 November 2024
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala Dinas



HJ. MEGAWATI IBRAHIM, SE., M.M

Padelal Pembina Utama Muda
NIP. 197202242000032002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Pertinggal;

**No. SERI 327**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Syech Yusuf No. 16 Kab. Takalar

Email: dpmpstakalar@gmail.com website: www.dpmpstakalar.go.id

Lampiran, Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar
2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Takalar
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar



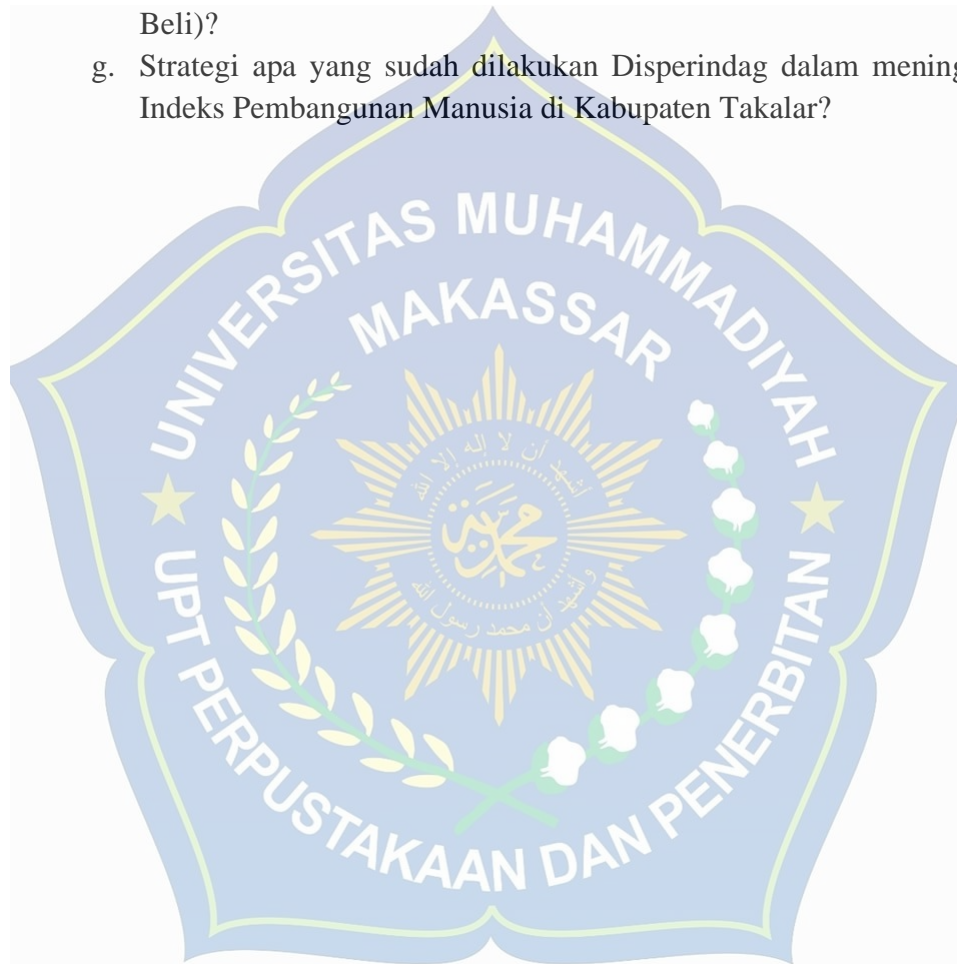
LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar :
 - a. Bagaimana peran Bappelitbangda dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Takalar?
 - b. Strategi yang pernah diupayakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
 - c. OPD-OPD mana saja yang menurut Bappelitbangda berhubungan langsung dengan pencapaian dan pembentukan IPM di Kabupaten Takalar?
 - d. Minta data yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pertanyaan Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar
 - a. Minta data yang terkait Indeks Pembangunan Manusia
 - b. Metode Perhitungan IPM seperti apa?
 - c. Peran BPS dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar seperti apa?
3. Pertanyaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar :
 - a. Rata-rata penduduk di Kabupaten Takalar pendidikan hingga ke jenjang apa? Berapa tahun lamanya bersekolah?
 - b. Ketersediaan/jumlah SMK dan Politeknik yang ada di Kabupaten Takalar berapa?
 - c. Adakah pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat usia produktif di Kabupaten Takalar?
 - d. Faktor-faktor apa saja yang membuat anak-anak di Kabupaten Takalar tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?
 - e. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar?
 - f. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
 - g. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
 - h. Strategi apa yang pernah diterapkan/akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
4. Pertanyaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar ;

- a. Akses kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Takalar seperti apa? Apakah masyarakat miskin sulit mendapatkan akses kesehatan atau seperti apa?
- b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Takalar?
- c. Adakah tunjangan-tunjangan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Takalar?
- d. Bagaimana ketersediaan akses air bersih bagi masyarakat (terutama masyarakat miskin) yang ada di Kabupaten Takalar?
- e. Terkait Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Takalar yang tinggi, faktor-faktor apa saja yang membuat AHH di Kabupaten Takalar meningkat?
- f. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
- g. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
- h. Strategi apa yang sudah pernah diterapkan/ akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
- i. Minta data yg berkaitan dengan kesehatan (pembangunan manusia)
5. Pertanyaan Dinas Koperasi , UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar
 - a. Terkait perizinan usaha apakah sulit?
 - b. Adakah pelatihan - pelatihan tertentu kepada masyarakat terhadap UMKM terkhusus petani dan nelayan?
 - c. Bagaimana kondisi bahan baku usaha, sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat?
 - d. Adakah kerja sama koperasi dan UMKM dengan kabupaten sekitarnya dalam hal perekonomian?
 - e. Bagaimana peran dinas Koperasi & UMKM dalam pembangunan manusia di Kabupaten Takalar?
 - f. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Koperasi & UMKM dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia?
 - g. Strategi apa yang sudah dilakukan Dinas Koperasi & UMKM dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar
 - a. Terkait perizinan perindustrian dan perdagangan apakah sulit?
 - b. Adakah pelatihan - pelatihan tertentu untuk meningkatkan kapasitas perdagangan baik itu petani maupun nelayan yang ada di Kabupaten Takalar?

- c. Bagaimana kondisi bahan baku usaha, sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Takalar?
- d. Adakah kerja sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kabupaten sekitarnya dalam hal perekonomian?
- e. Bagaimana peran dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Takalar?
- f. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Daya Beli)?
- g. Strategi apa yang sudah dilakukan Disperindag dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Takalar?



LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Keterangan gambar 1

Wawancara bersama Bapak Arifin, S.AP.,M.AP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)



Keterangan Gambar 2

Wawancara bersama Ibu Dewi Intansari (Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar)



Keterangan Gambar 3

Wawancara bersama Bapak Mursalim, S.E., M.M. (Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar)



Keterangan Gambar 4

Wawancara bersama Bapak Arman (Staf Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar)



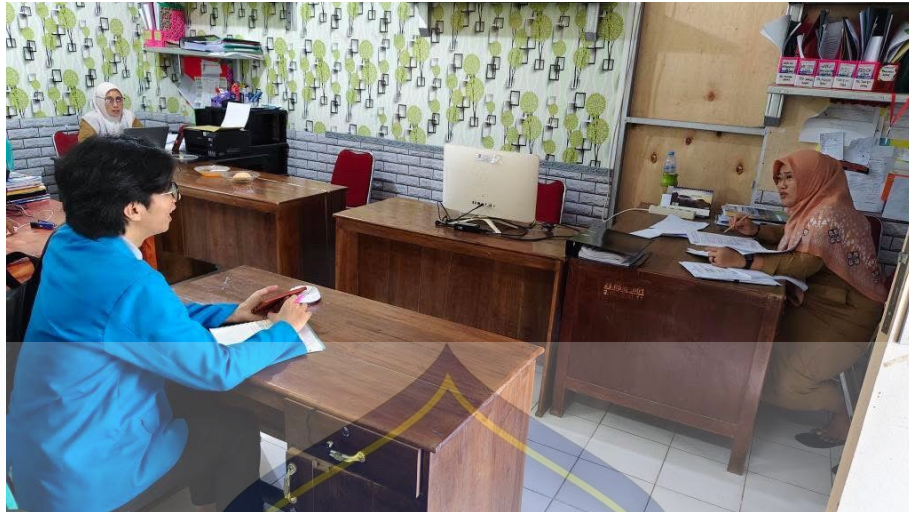
Keterangan Gambar 5

Wawancara bersama Ibu Ninik (Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar)



Keterangan Gambar 6

Wawancara bersama Bapak H.A. Amrillah.J.Sangaji, S.STP.,SH.,M.A.P. (Kepala Bagian Perencanaan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)



Keterangan Gambar 7

Wawancara bersama Ibu Karlinda (Kepala Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar)



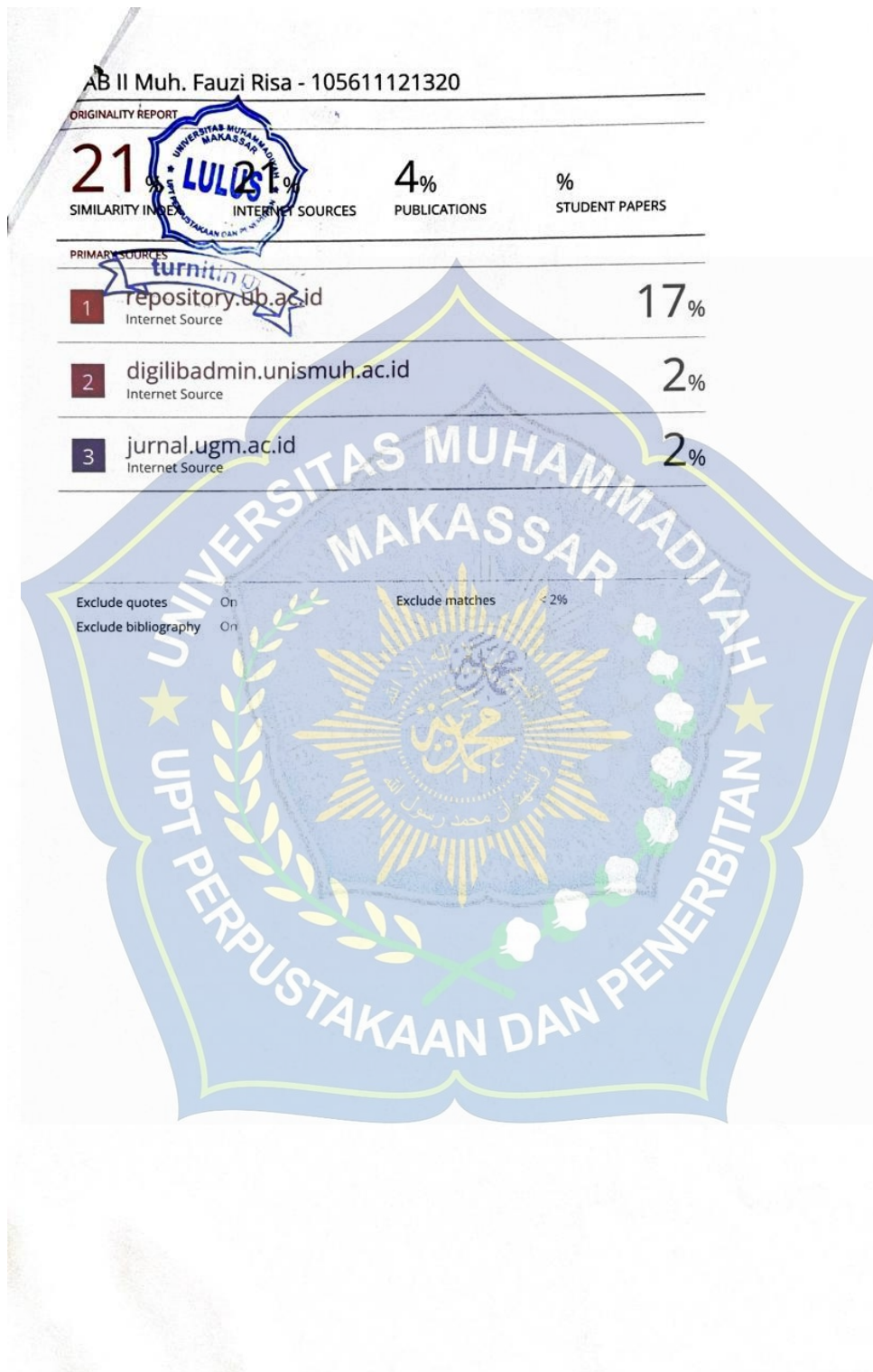
LAMPIRAN 4

HASIL TURNITIN

Hasil Turnitin Bab I



Hasil Turnitin Bab II



Hasil Turnitin Bab III

BAB IV Muh. Fauzi Risa- 105611121320

ORIGINALITY REPORT

9% **LULUS** **9%**

SIMILARITY INDEX PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	7%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ Exclude matches ☐ Exclude bibliography ☐ Exclude matches ☐ < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hasil Turnitin Bab V

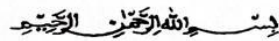


Hasil Turnitin Keseluruhan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Fauzi Risa
Nim : 105611121320
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	21%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 20 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Muh. Fauzi Risa yang biasa di sapa Fauzi/Oji, lahir di Takalar, 01 Juli 2002 merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Risa Tahir, S.Ag dan Ibu Johoriah, S.Pd. Penulis berkebangsaan Indonesia beragama Islam dan berasal dari Mamuju Tengah.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar SDN 013 Padang Sarre Pada tahun 2008 tamat 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Al – Jihad Buangin pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Kemudian terdaftar sebagai siswa Sekolah Menengah Atas MA Muhammadiyah Balebo pada tahun 2017 hingga tamat 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Riwayat Organisasi Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Luwu Utara periode 2018 – 2020, yang kemudian sekarang sedang menjabat sebagai anggota Bidang Advokasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Selatan periode 2023 – 2025.